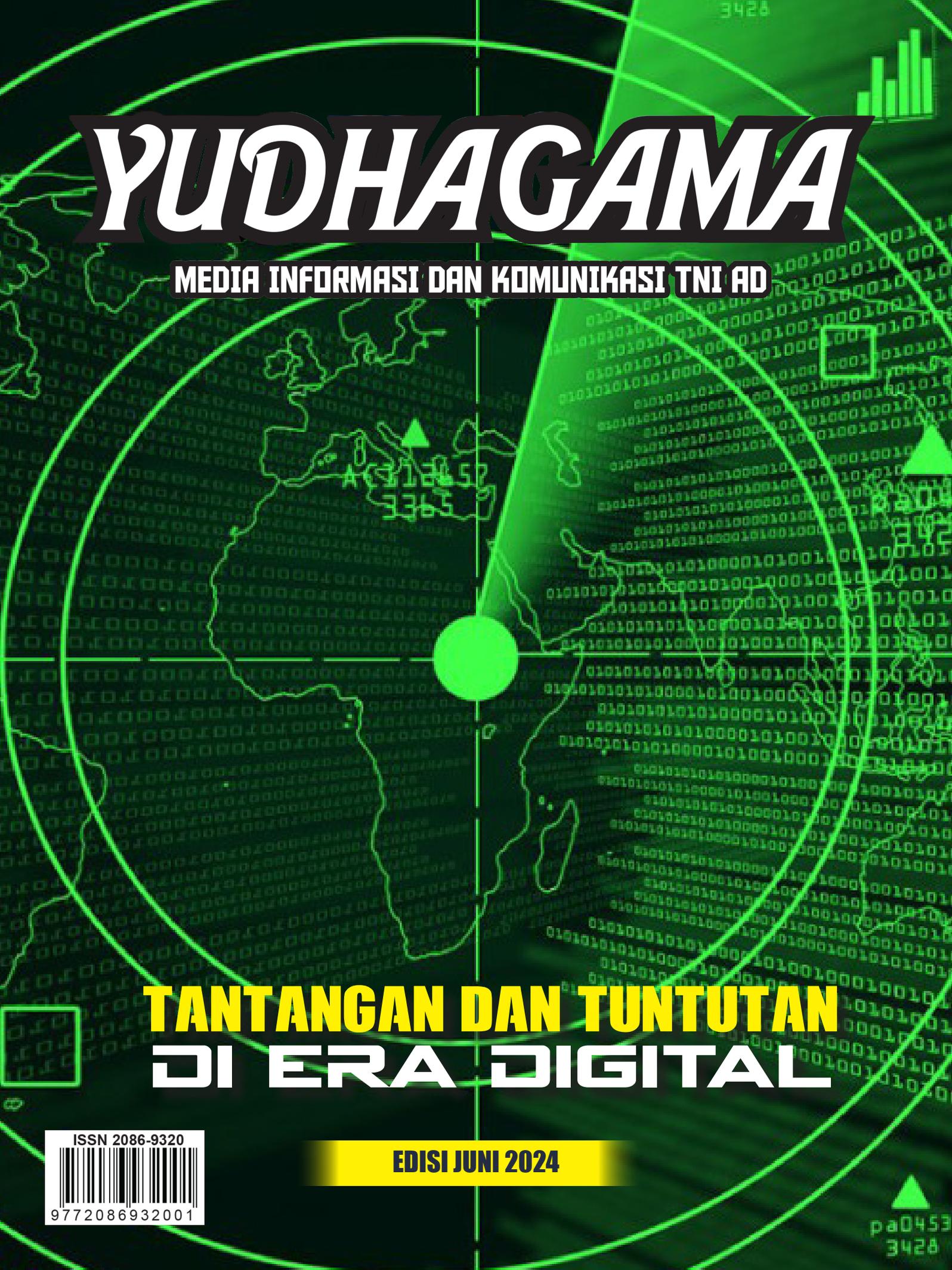


3428



YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD



TANTANGAN DAN TUNTUTAN DI ERA DIGITAL

ISSN 2086-9320

9772086932001

EDISI JUNI 2024

pa0453
3428



SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Brigjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han)

Pemimpin Redaksi

Kolonel Arh Sudrajat, S.H., M.I.P.

Sekretaris Redaksi

Letkol Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd.

Koordinator Liptan

Letkol Caj Triyono, S.I.P.

Redaktur Bahasa & Editor

Mayor Caj (K) Besarah Septiana M., S.S.

Redaktur Pracetak

PNS Listin

Fotografer

Serma Taufik Armanto

Desain Grafis

Sertu (K) Intan Indah Permatasari

Editor

PNS Kuseri



**BRIGJEN TNI KRISTOMEI SIANTURI, S.Sos., M.Si. (Han)
(KADISPENAD)**

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya Tim redaksi dapat menerbitkan Jurnal Yudhagama Volume 44 Nomor II Edisi Juni 2024. Jurnal ini menyajikan beberapa tulisan dari kalangan Militer yang berhasil dihimpun oleh Tim redaksi, baik dari para Pati, Pamen dan Pama TNI AD yang bertugas di Satuan jajaran TNI AD.

Tema dan isi tulisan yang ditampilkan dalam Jurnal ini menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi yang diemban para penulis, sehingga semakin menarik untuk dibaca. Para pembaca dimana pun berada, terutama prajurit dan PNS TNI AD serta keluarga dapat mengambil manfaat dari tulisan-tulisan yang ada ini untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan.

Disadari bahwa dalam jurnal ini masih terdapat kekurangan, harapan kami para pembaca sekalian dapat memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan Jurnal Yudhagama edisi berikutnya, sehingga menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca.

YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD

Alamat Redaksi

Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat
Jl. Veteran No. 5, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300

Alamat Email

palaganyudhagama@gmail.com,
dispenad@mabasad.mil.id

Website

<https://www.tniad.mil.id>

Youtube

TNI Angkatan Darat

Facebook

<https://www.facebook.com/AngkatanDaratTNI>

Twitter (X)

https://twitter.com/TNI_AD_Official

Instagram

https://www.instagram.com/tni_angkatan_darat

Tiktok

<https://www.tiktok.com/@tni.angkatan.darat>

Majalah Digital

<https://militer-angkatandarat.com>

Daftar Isi

Tantangan dan Tuntutan di Era Digital Mayjen TNI Iroth Sonny Edhie	6
Penyelesaian Konflik Papua Secara Holistik Menuju Indonesia Maju Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr.(Han)	13
Geodefense Sebagai Acuan <i>Global Security</i> Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr. (Han)	18
Menggali Potensi Hasil Disertasi Doktor Fisika Poltekad Brigjen TNI Dr. Rachmat Satiawibawa, S.I.P., M.M., M.Tr. (Han)	23
Program Unggulan Ketahanan Pangan Kodam IM, I'm Jagong Kolonel Inf Budi Rahmawan	30
YKEP Untuk Kesejahteraan Keluarga Besar TNI Angkatan Darat Brigjen TNI (Purn) Abdul Karim	38

Penyelesaian Konflik di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Dengan Pendekatan Kearifan Lokal	43
Letkol Inf Hulisda Melala, S.E., M.I.P.	
Peran Denbekang V/1.B Madiun	49
Letkol Cba I Ketut Arsana Putra S.T., M.Sc.	
Pengabdian Kodim 1206/Putussibau	59
Letkol Inf Nasli S.Sos.	
Peran Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan	62
Letkol Arm Andreas Prabowo Putro, S.I.P., M.I.P., M.Han	
Laboratorium Forensik-Biometrika	68
Mayor Cpm Ibrahim Rahman Putra, S.H.	
Pensiun Bahagia	74
Drs. Tatang Nuryaman, M.M.	

**Transformasi Corps Perhubungan (CHB)
menjadi Corps Komunikasi dan Elektronika (CKE) :**

Tantangan dan Tuntutan di Era Digital

Oleh: Mayjen TNI Iroth Sonny Edhie
(Kapushubad)



Revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 yang terjadi saat ini telah mengubah wajah peradaban manusia melalui penggunaan *artificial intelligence (AI)*, periode *internet of things (IoT)* atau penggunaan internet dalam setiap bidang kehidupan seperti *big data analysis, cloud computing, robotic, manufactur additive, augmented reality, virtual reality dan cyber security* yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia dalam peningkatan performance tetapi juga memunculkan permasalahan baru yang lebih kompleks. Permasalahan-permasalahan inilah yang seharusnya dapat diatasi dengan lebih baik dalam konteks era yang lebih terbaru. Evolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat ini telah mendorong setiap organisasi untuk melakukan transformasi dan perubahan-perubahan khususnya terhadap doktrin, peraturan dan kebijakan agar tetap agile dan mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. TNI Angkatan Darat sebagai sebuah organisasi militer yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI yang sarat dengan penggunaan alutsista berteknologi tinggi telah melakukan langkah penyesuaian terhadap doktrin perang maupun fungsi yang dituangkan kedalam doktrin Kartika Eka Paksi (KEP) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok.

Sebagai pedoman strata tertinggi di TNI AD, doktrin KEP merupakan pijakan utama dalam pembinaan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan di jajaran TNI AD. Doktrin KEP yang menjadi dasar dan turunan berbagai piranti lunak dan kebijakan serta penyusunan organisasi TNI AD harus linier dan harmonis dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (TRIDEK) agar terjadi keselarasan gerak dan keterpaduan komando dalam implementasinya. Selain itu, dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis, dinamika ancaman dan tuntutan tugas maka doktrin KEP dinilai perlu lebih disesuaikan agar organisasi TNI AD senantiasa dan terus mampu menjawab setiap tuntutan tugas secara efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu upaya awal yang harus dilakukan adalah perlunya keberadaan *Corps* yang menaungi bidang/fungsi Komunikasi dan Elektronika.

Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat atau Pushubad berdasarkan Doktrin Kartika Eka Paksi memiliki fungsi teknis Perhubungan dalam menyelenggarakan kemampuan peperangan elektronika (Pernika), komunikasi dan elektronika, sistem komando pengendalian (Siskodal) dan informasi, foto film militer serta konstruksi, pembekalan, pemeliharaan,

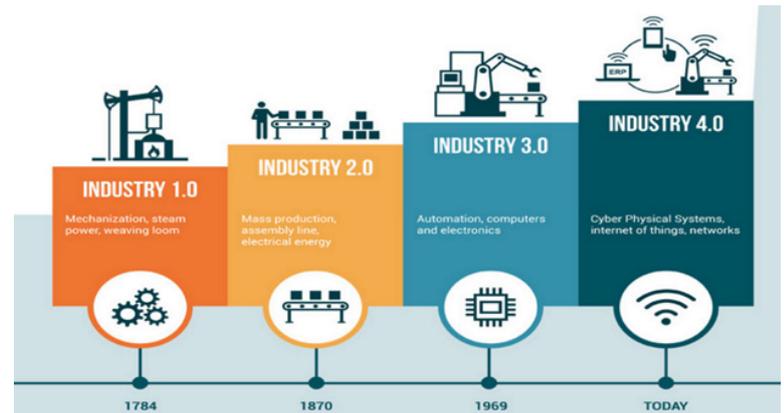
¹Keputusan Kasad Nomor Kep/1024/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.

instalasi (Konbekharstal) materiel perhubungan guna mendukung fungsi utama TNI AD¹ dan merupakan satuan TNI AD yang sangat lekat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun demikian, permasalahan krusial yang dihadapi oleh Pushubad adalah terjadinya perbedaan nomenklatur Perhubungan yang ada didalam Doktrin KEP dengan Komunikasi dan Elektronika (Komlek) didalam Doktrin TRIDEK. Perbedaan ini tentunya menyebabkan terjadinya disharmoni kebijakan dan marginalisasi pada bidang dan tugas terkait fungsi perhubungan apabila disandingkan dengan Mabes TNI, Mabesal dan Mubesau yang telah mengadopsi dan memiliki kesamaan nomenklatur "Komlek". Menyadari urgensi akan perubahan 'Perhubungan' menjadi 'Komunikasi dan Elektronika' adalah sebuah keniscayaan untuk efektifitas Sistem Komando dan Kendali dalam rangka optimalnya pencapaian tugas pokok TNI AD, maka berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/145/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, nomenklatur *Corps* Perhubungan (CHB) secara resmi berubah menjadi *Corps* Komunikasi dan Elektronika (CKE).

Tantangan dan Tuntutan Komunikasi dan Elektronika TNI AD ke Depan

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ilpengtek) yang ditandai dengan munculnya Revolusi Industri 4.0 telah mengubah medan perang abad ke-21, dengan beberapa cara berbeda, yaitu ruang angkasa dan satelit. Ruang pertempuran saat ini tidak hanya di darat, laut, dan udara, tapi saat ini sudah mencakup pada satelit ruang angkasa dan siber. Selain itu perkembangan lainnya adalah teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang membantu proses pengambilan keputusan secara mandiri, big data, machine learning, sistem otomatis, dan teknologi robot. Revolusi Industri 4.0 telah mendorong

munculnya serangkaian sistem senjata baru yang inovatif, termasuk senjata elektromagnetik, senjata energi terarah, proyektil kecepatan tinggi, dan rudal hipersonik.²



Gambar 1. Revolusi Industri 4.0

Mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis guna mewujudkan Komunikasi dan Elektronika yang profesional dan memiliki kemampuan proyeksi regional berkomitmen secara global yang menyebabkan tantangan dan tuntutan tugas menjadi kompleks, maka Komunikasi dan Elektronika TNI AD harus melakukan penyesuaian terhadap peran, tugas, dan fungsinya, serta dimilikinya kemampuan yang adaptif terhadap perubahan karakter perang. Untuk menjawab tantangan dan tuntutan tugas Komunikasi dan Elektronika TNI AD masa depan, dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, Analisis Sistem Riset Operasi (ASRO), dan *Transfer of Technology (ToT)* serta penguatan peran pembinaan Komunikasi dan Elektronika untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan darat ke depan agar dapat berperan di lingkup nasional, regional dan global.

²Barno. David, Bensahel. Nora, 2018, *War in The Fourth Industrial Revolution*, Texas National Security Review

a. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi telah membentuk dunia tanpa batas, sehingga ancaman terhadap kedaulatan negara dapat terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Militer di dunia saat ini telah mentransformasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan bertempur seperti sistem kendali senjata (*remote control weapon system*), pengintaian (*reconnaissance*) dan identifikasi elektronik (*electronic identification*) serta pengamatan (*surveillance*). Hal ini menuntut Komunikasi dan Elektronika TNI AD untuk meningkatkan kemampuan peperangan elektronika (*electronics warfare*), kemampuan peperangan siber (*cyber warfare*) untuk memperlemah daya tempur musuh dan memperbesar daya tempur sendiri, serta kemampuan prajurit yang andal sesuai dengan tuntutan tugasnya.

b. Perkembangan Alutsista dengan Teknologi Tinggi

Paradigma perang saat ini berkembang menuju perang teknologi tinggi di antaranya *Asymmetric Warfare*. Perang ini terjadi dengan menggunakan kecanggihan teknologi (*cyber, network centric, robotic, bio technology, dan nano technology*) antara lain pemanfaatan bom nuklir, *PTTA/drone* yang dipersenjatai maupun tidak, serta *cyber army* yang memiliki kemampuan melumpuhkan sistem dengan menggunakan komputer dan jaringan internet. Militer dunia saat ini telah memodernisasi alutsistanya dalam menghadapi perang masa kini, sehingga

peperangan akan sangat didominasi oleh kecanggihan teknologi alutsista. Perkembangan teknologi alutsista yang sangat pesat tersebut membutuhkan penyesuaian dalam mengintegrasikan seluruh kecabangan dalam operasi tempur. Dengan berkembangnya modernisasi alutsista dihadapkan pada perang berteknologi tinggi memerlukan kemampuan Komunikasi dan Elektronika TNI AD untuk menguasai teknologi yang modern, sehingga menghasilkan pertempuran yang efektif, efisien, mempunyai daya guna, daya tangkal dan daya tempur tinggi.

c. Perkembangan Taktik Pertempuran Darat

Mencermati beberapa peristiwa pertempuran darat kontemporer di beberapa negara, dapat disimpulkan bahwa perkembangan taktik perang darat di dunia sangat didominasi oleh perkembangan teknologi persenjataan, informasi, komunikasi, penginderaan, dan teknologi militer lainnya yang mendukung khususnya pada efektivitas sistem informasi untuk mendukung kodal (*network command and control*), tembakan meliputi ketepatan (*precision*), kekuatan daya hancur (*fire power*) dan jarak tembak (*range*), manuver berupa kecepatan dan kelincahan serta keterpaduan kesenjataan (*combined arms*) antar kecabangan dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk memenangkan pertempuran. Disinilah peran sentral Komunikasi dan Elektronika TNI AD untuk dapat mewujudkan Siskodal dalam mendukung penyaluran informasi guna kecepatan dan ketepatan pengambilan Keputusan oleh pimpinan.

Sebagaimana perkembangan teknologi dewasa ini, maka tantangan dan tuntutan tugas Komunikasi dan Elektronika TNI AD di masa mendatang, akan semakin multidimensional. Pelibatan teknologi satelit, informasi, keterpaduan kesenjataan (*combined arms*) dan operasi gabungan trimatra (*joint operation*), serta bagaimana membentuk kapabilitas siber untuk setiap eselon pasukan matra darat pada operasi serangan dan operasi pertahanan yang patut dipersiapkan. Hal ini sesuai dengan konsep pertempuran multi-domain (*multi-domain battle*) harus dihadapi dengan konsep daya tempur gabungan (*joint warfighting concept*) yang melibatkan seluruh kemampuan daya tembak dari semua matra secara terintegrasi tidak hanya angkatan darat saja, tetapi juga angkatan laut dan udara³.

Dihadapkan dengan strategi dan taktik pertempuran darat masa depan yang telah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi serta kecerdasan buatan sangat memungkinkan masuknya kekuatan asing ke wilayah teritorial atau kedaulatan kita. Dengan demikian, perlu kiranya Komunikasi dan Elektronika TNI AD mempersiapkan diri untuk melakukan tahapan perang berlarut (*protracted warfare*). Hal ini sesuai kebijakan pertahanan negara Indonesia bahwa sistem pertahanan negara adalah Sishankamrata yang mengacu pada pertahanan defensif aktif, menerapkan totalitas pengerahan seluruh sumber daya dan komponen bangsa untuk terlibat secara nyata dalam pertahanan dan keamanan negara yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan⁴.

Selanjutnya, tuntutan tugas Komunikasi dan Elektronika TNI AD ke depan juga akan semakin kompleks akibat perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi Sosial 5.0 yang telah menambah dimensi pertempuran dari darat, laut, dan udara meluas ke ranah ruang angkasa dan ruang siber. Paradigma perang modern di masa yang akan datang antara lain perang asimetris dan perang tak terbatas yang

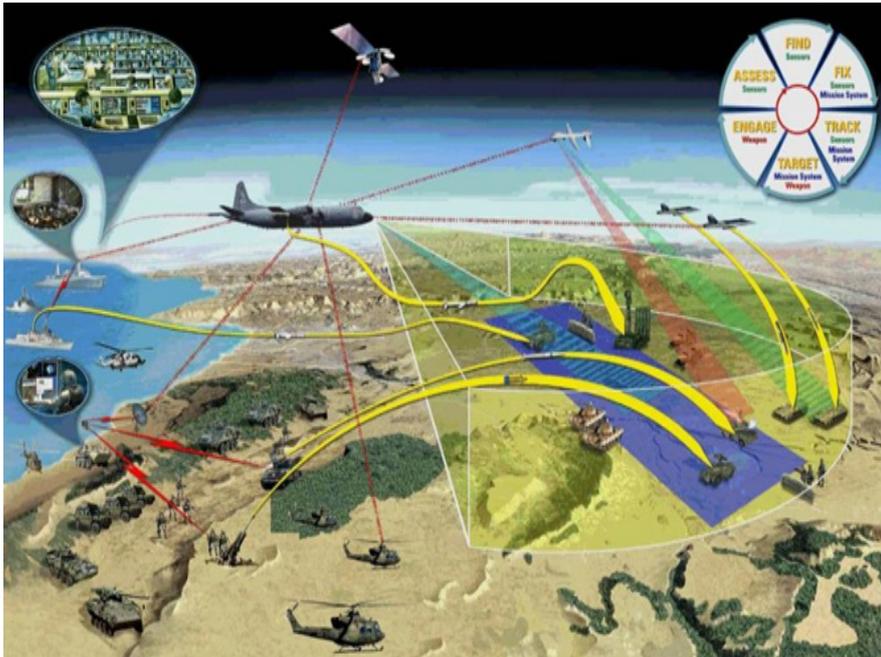
mengandalkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, unsur militer, serta aspek nirmiliter. Karakteristik perang modern antara lain: terjadinya ancaman secara sistematis, bersamaan dan simultan; perang keunggulan teknologi persenjataan; perang berbasis kecerdasan buatan seperti teknologi robot telah melahirkan perang dengan menggunakan wahana tak berawak, dan perang siber. Salah satu konsep dalam perang modern adalah lahirnya *Network Centric Warfare* (NCW) sebagai sebuah doktrin atau teori perang yang bertujuan untuk mengubah keunggulan informasi, yang sebagian didukung oleh teknologi informasi, menjadi keunggulan kompetitif melalui jaringan komputer antara pasukan yang tersebar⁵. Komunikasi dan Elektronika kedepan diharapkan dapat mengambil peran dan mengoptimalkan fungsinya dalam NCW.

Adapun beberapa karakteristik dari NCW antara lain: a. Kesadaran Bersama yaitu kemampuan untuk memiliki pemahaman bersama tentang situasi, musuh, dan pasukan sendiri di berbagai tingkat dan domain militer; b. Kecepatan komando yang meningkat berupa kemampuan untuk membuat keputusan dan melaksanakannya dengan cepat dan efektif, dengan ketangkasan dan presisi; c. Tempo operasi yang lebih tinggi yakni kemampuan untuk melakukan lebih banyak aksi dalam waktu dan ruang tertentu, menciptakan keunggulan yang luar biasa atas musuh; d. Lethalitas yang lebih besar berupa kemampuan untuk memberikan efek yang lebih tepat dan merusak pada musuh, sambil meminimalkan kerusakan sampingan dan korban di pihak sendiri; e. Survivabilitas yang meningkat. Kemampuan untuk melindungi pasukan sendiri dari serangan musuh, dengan menggunakan *stealth*, tipuan, dispersi, dan mobilitas; f. Tingkat sinkronisasi diri untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan unit dan elemen lain tanpa bergantung pada struktur komando dan kontrol yang terpusat.

³Perkins. G. David, Jame, 2018, *Multidomain Battle: Converging Concepts Toward a Joint Solution*, NDU-Joint Force Quarterly 88 pg. 56-58

⁴Kemhan, 2014, Buku Putih Pertahanan

⁵<https://future.warsnetwork.rspanwar.net/network-centric-warfare>, disalin pada 27 Mei 2024



Gambar 2. Visualisasi Network Centric Warfare (NCW)

NCW didukung oleh berbagai teknologi, seperti sensor, sistem komunikasi, komputer, satelit, drone, kecerdasan buatan, dan *cyberwarfare*. Teknologi-teknologi ini memungkinkan militer untuk mengumpulkan, mengolah, berbagi, dan memanfaatkan informasi secara real time, menciptakan pasukan yang terhubung yang dapat beradaptasi dan merespon situasi yang berubah. NCW bukan hanya konsep teknis, tetapi juga kultural dan organisasional. Ini membutuhkan perubahan pola pikir dan perilaku dari cara tradisional dan linier perang, menjadi lebih terdistribusi dan dinamis. Ini juga membutuhkan perubahan dalam cara militer melatih, mendidik, dan beroperasi, untuk menumbuhkan budaya inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran. Konsep pertempuran berbasis jaringan NCW merupakan pendekatan di mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan keunggulan tempur dengan mempercepat aliran informasi, memperbaiki pemahaman situasional, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Ini melibatkan integrasi sistem dan platform militer dalam jaringan yang terkoordinasi untuk memungkinkan pertukaran data *real-time* dan koordinasi taktis yang lebih baik di medan pertempuran.

Dalam pertempuran saat ini, sistem kerja NCW melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi teknologi tinggi untuk mengumpulkan, mentransfer, dan menganalisis data secara langsung dari berbagai sumber, termasuk sensor, platform militer, dan intelijen. Informasi ini kemudian diproses dan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan di lapangan, termasuk komandan dan pasukan tempur, untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Beberapa contoh aplikasi dari konsep NCW dalam pertempuran modern meliputi:

- a. Sistem Sensor Terintegrasi. Pada medan perang, pesawat tempur, drone, kapal perang, dan kendaraan darat dilengkapi dengan sensor yang saling terhubung, memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan melacak target dengan lebih akurat. Contohnya adalah penggunaan sensor radar, termal, dan optik yang terhubung dalam jaringan untuk memberikan pemahaman situasional yang lebih baik kepada para komandan.
- b. Jaringan Komunikasi Seluler. Pasukan terlibat dalam pertempuran dapat menggunakan jaringan komunikasi seluler yang kuat dan aman untuk berbagi informasi secara real time, termasuk lokasi musuh, intelijen baru, dan status pasukan sendiri. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara unit-unit yang berbeda dan mempercepat respons terhadap perubahan situasi.

c. Pusat Komando dan Kontrol Terpusat. Pusat komando dan kontrol menggunakan sistem komputer yang terintegrasi untuk mengelola dan menganalisis data yang diterima dari berbagai sumber. Ini memungkinkan para komandan untuk memantau situasi secara real time, merencanakan operasi, dan memberikan arahan kepada pasukan dengan lebih efektif.

d. Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem informasi geografis digunakan untuk memetakan medan perang dan mengidentifikasi posisi musuh, pasukan sendiri, dan sasaran penting lainnya. Ini membantu pasukan untuk membuat keputusan taktis yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan tempur.

e. Aplikasi Perang Elektronik. Perang elektronik (EW) memanfaatkan teknologi komunikasi dan sensor untuk mengganggu dan mengganggu sistem komunikasi musuh dan kemampuan sensor. Dalam konteks NCW, aplikasi perang elektronik dapat digunakan untuk menekan kemampuan komunikasi musuh, mengganggu navigasi GPS mereka, atau mengacaukan sensor mereka, memberikan keunggulan taktis kepada pasukan sendiri.



Gambar 3. Visualisasi Interoperabilitas Siskodal dan Informasi TNI AD

Dengan berubahnya hakikat ancaman dan perkembangan taktik pertempuran darat maka Komunikasi dan Elektronika TNI AD kedepan diharapkan mampu melakukan transformasi dan evolusi agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam mendukung tugas pokok TNI AD dengan segala upaya antara lain:

- a. Mewujudkan kekuatan dan gelar kekuatan Komunikasi dan Elektronika Angkatan Darat yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif dengan pembangunan kekuatan dan kemampuan tempur maupun fungsi-fungsi utama dalam mendukung tugas pokok TNI AD.
- b. Komunikasi dan Elektronika TNI AD yang memiliki kemampuan dalam mendukung Operasi Militer Matra Darat dengan penajaman dan peningkatan kemampuan teknis perhubungan pada setiap fungsi (Pernika, Komlek, Siskodal dan info, Foto Film Militer dan Konbekharstal) guna mendukung kebutuhan taktis operasi.
- c. Mewujudkan jati diri prajurit Komunikasi dan Elektronika TNI AD yang tangguh, ber-intelektual, memiliki keunggulan moral, rela berkorban dan pantang menyerah serta berintelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
- d. Komunikasi dan Elektronika Angkatan Darat dengan pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan yang komprehensif dalam mencetak dan mewujudkan postur prajurit Perhubungan yang modern, berpengetahuan, tanggap akan perubahan dengan tetap berpedoman pada sesanti *Cighra, Apta Nirbaya*.

- e. Terwujudnya kesiapan operasional Komunikasi dan Elektronika Angkatan Darat dalam menghadapi setiap bentuk ancaman militer, ancaman non-militer maupun ancaman hybrid, interoperabilitas komunikasi dan elektronika serta kegiatan pemeliharaan Materiel Perhubungan yang berkelanjutan dengan mengacu metode MRO (*maintenance, repair dan overhaul*) dan perbaikan sistem *supply and chain*.⁶



Transformasi dan perubahan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap organisasi, tidak terkecuali Pushubad agar tetap agile di era yang penuh ketidakpastian, gejolak, kompleks, dan ambigu atau yang lebih dikenal dengan VUCA world (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*)⁷. Perubahan corps perhubungan (CHB) menjadi Komunikasi dan Elektronika (CKE) yang selanjutnya akan diikuti dengan perubahan nama satuan Pusat Perhubungan TNI AD (Pushubad) menjadi Pusat Komunikasi dan Elektronika TNI AD (Puskomlekad)

dengan ditunjang doktrin-doktrin bidang Komunikasi dan Elektronika yang linier dan selaras dengan perkembangan lingkungan strategis, kemajuan Ilpengtek dan perubahan taktik pertempuran diharapkan akan menjadikan corps Komunikasi dan Elektronika yang PRIMA dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Salam KAPOTA-Cigrha Apta Nirbaya.

⁶Keputusan Kasad Nomor Kep/892/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Logistik TNI AD.

⁷<https://warroom.armywarcollege.edu>, disalin pada tanggal 27 Mei 2024.

PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA SECARA HOLISTIK MENUJU INDONESIA MAJU

Oleh: Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr. (Han)
(Pangdam XVIII/Kasuari)



Sejarah singkat dan proses bergabung ke NKRI

Irian Barat atau Papua adalah provinsi yang terletak di ujung Timur Indonesia. Berdirinya Papua bermula dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 1949. Melalui KMB, Belanda bersedia memberikan kedaulatannya kepada Indonesia, akan tetapi antara Indonesia dan Belanda masih terlibat konflik. Kedua negara ini tetap merasa berhak atas tanah Papua atau Irian Barat. Karena Belanda tetap ingin Papua bagian barat terbentuk sebagai negara sendiri, akhirnya mereka membawa masalah ini ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada akhirnya, Belanda bersedia berdiskusi kembali dengan Indonesia, yang kemudian terbentuk perjanjian New York. Isi perjanjian tersebut Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia.



Perjanjian New York

Melalui perjanjian tersebut, Belanda bersedia menyerahkan kekuasaannya atas Papua atau Irian Barat kepada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA). Namun, Belanda mensyaratkan agar Indonesia melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Hasil Pepera menunjukkan bahwa Papua bagian barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1963 hingga 1973.

Pada masa kepemimpinan Presiden K.H Abdurrahman Wahid (Gusdur) mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengamanatkan nama Provinsi ini diganti menjadi Papua.

Tanggal 1 Mei 1963 merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Papua, karena terjadi peristiwa proses kembalinya Irian Barat (Papua) ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diambil alih langsung oleh Pemerintah Indonesia melalui prosedur yang sah dan demokratis serta diterima oleh hukum Internasional. Sejak Oktober 1962, bendera PBB berkibar dan berdampingan dengan Sang Merah Putih, namun pada tanggal 1 Mei 1963 bendera PBB diturunkan dan Sang Merah Putih tetap berkibar sampai

saat ini di Papua. Hal itu berarti bahwa kembalinya Papua Barat/Irian Barat telah final dengan adanya resolusi PBB yang dicetuskan dalam perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962.

Sejalan dengan adanya pemekaran pemerintahan di wilayah Papua, maka Papua dibagi menjadi dua Provinsi yaitu Provinsi Papua yang beribu kota di Jayapura dan Papua Barat beribu kota Manokwari. Provinsi Papua Barat lahir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, Provinsi Papua kemudian dimekarkan menjadi empat Provinsi yakni Provinsi Papua dengan Ibu Kota Jayapura, Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, Provinsi Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Wamena, Provinsi Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke. Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan lebih dulu diresmikan, melalui Undang-Undang tentang Daerah Otonomi Baru "Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua

Pegunungan, sementara itu pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan melalui rapat DPR RI bersama pemerintah dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang disahkan pada tanggal 17 November 2022". (Dikutip dari Sekretariat Kabinet RI).

Masyarakat Papua memiliki kehidupan yang berpindah-pindah (nomaden) sebelum datangnya pengaruh dari luar. Masyarakat Papua juga hidup yang terbentuk dari kelompok-kelompok kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam, dan selalu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya secara efisien. Berbeda dengan masyarakat di wilayah

lain yang menetap dan membangun kerajaan atau kesultanan, masyarakat Papua menjalani kehidupan yang berpindah-pindah untuk mencari sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, pola hidup dan struktur sosial masyarakat Papua, membentuk kelompok kecil yang dikenal sebagai klan atau suku. Setiap klan memiliki wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka sementara waktu. Ketika sumber daya alam di satu wilayah habis atau menipis, mereka akan berpindah ke wilayah lain yang masih kaya akan sumber daya.

Konflik dan Konsep Penyelesaiannya

Mengatasi konflik yang terjadi di Papua sampai dengan saat ini masih menemui berbagai permasalahan karena Papua sebuah daerah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam, juga menjadi tempat terjadinya konflik yang kompleks dan berkelanjutan. Konflik di Papua telah mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat, menghambat pembangunan, dan menimbulkan ketidakstabilan Nasional. Namun, dengan pendekatan yang tepat, ada harapan untuk menyelesaikan konflik ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Papua dan masyarakatnya. Berikut ini beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi konflik di Papua diantaranya :

Pertama, Konflik Papua harus diselesaikan secara holistik/menyeluruh. Konflik Papua harus disadari oleh kita semua bahwa penyelesaiannya bukan merupakan tanggung jawab dari TNI-Polri saja namun merupakan tanggung jawab semua elemen atau Kementerian/Lembaga yang ada. Untuk itu, perlu dilakukan suatu

koordinasi yang terstruktur sehingga akan melahirkan suatu konsep/kesepakatan bersamadilaksanakansecarabersama-sama dengan mengesampingkan ego sektoral. Konsep ini dapat dilakukan dengan sebuah perencanaan yang melibatkan TNI sebagai unsur utama dalam penindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sementara Polri sebagai unsur Kamtibmas dan Kementerian/Lembaga lain sebagai pendukung utama (PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian lainnya yang dianggap perlu). Semuanya harus terorganisir secara utuh sehingga akan terlihat dengan jelas sasaran atau tujuan yang ingin dicapai pada proses penyelesaian konflik Papua. Bila kebersamaan ini tidak dilakukan, maka akan nampak ego sektoral masing-masing untuk berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Kita harus menyadari bahwa masyarakat Papua merupakan bagian dari keluarga kita yang harus betul-betul kita sadarkan melalui pendekatan kemanusiaan dengan tetap memprioritaskan tindakan keamanan. Dengan kata lain, oknum masyarakat yang masih berseberangan terlibat dalam OPM

dan tidak mau bergabung dengan NKRI dimana sudah dilakukan pendekatan tetapi masih belum mengindahkan maka harus kita selesaikan dengan tindakan represif.

Kedua, Saat pelaksanaan tugas operasi, harus terintegrasi. Personel TNI yang diberikan amanah untuk melaksanakan tugas di tanah Papua harus dibekali dengan pengetahuan geografi, demografi, adat budaya serta terlibat pada pembangunan yang nyata dimana sebelumnya sudah berkoordinasi dengan semua Kementerian atau Lembaga terkait terhadap infrastruktur yang akan dibangun oleh TNI, sehingga akan terlihat dengan jelas hasil pembangunan yang dilakukan oleh TNI saat bertugas. Pembangunan yang dihasilkan ini, bukan merupakan buah tangan dari TNI saja namun pembangunan ini merupakan hasil dari kita semua, sebagai contoh adalah pembangunan jalan Trans Papua (Jalan Nasional/Provinsi) dari Kota Manokwari menuju ke Kabupaten Tambrauw, Maybrat, sampai ke Sorong harus dilakukan oleh TNI. Bila pembangunan jalan ini diserahkan ke kontraktor sipil dan terjadi penyerangan terhadap kontraktor tersebut, maka secara otomatis, pekerjaan pembanguan infrastruktur jalan tersebut akan terbengkalai dan tidak akan terselesaikan, hal ini tentunya akan berdampak terhadap pembangunan-pambangunan yang lainnya. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kehadiran TNI di tanah Papua adalah untuk membangun dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan adanya pembangunan yang nyata oleh TNI tersebut diharapkan akan menggugah simpatisan OPM untuk kembali sadar dan bergabung dengan masyarakat Papua pada umumnya dan bersama-sama membangun tanah Papua yang kita cintai. Adapun contoh lainnya dalam bidang pertanian, TNI bersama dengan masyarakat setempat dapat diperbantukan dalam membuka lahan. Pada prinsipnya, kegiatan yang dilakukan oleh TNI sebelumnya sudah dikoordinasikan secara matang dengan Kementerian/Lembaga terkait sehingga tidak menimbulkan perseden yang kurang baik terhadap pelaksanaan tugas operasi

TNI di wilayah Papua, atau dengan kata lain TNI merampas pekerjaan Kementerian/ Lembaga lain. Dalam pelaksanaannya tugas operasi ini sangat membutuhkan alokasi dana yang sangat besar sehingga koordinasi yang matang dan terarah serta menghasilkan kesepakatan bersama sangat membantu proses penyelesaian pembangunan dan konflik yang terjadi di wilayah Papua.



Pembakaran alat berat pembangunan jalan Trans Papua oleh OPM

Ketiga, Proses tugas operasi TNI harus berkesinambungan. Pelaksanaan tugas operasi yang dilakukan oleh TNI di wilayah Papua harus berjalan secara terus-menerus dan terukur serta dapat dinilai hasilnya oleh masyarakat, hal ini nampak dengan jelas terhadap hasil pembangunan yang dilakukan oleh TNI. Pentingnya memastikan bahwa manfaat dari setiap tugas operasi TNI dirasakan langsung oleh masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Upaya pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan adalah beberapa contoh konkret dari bagaimana TNI dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam kehidupan masyarakat khususnya saat bertugas. Dengan membangun proses tugas operasi TNI yang berkesinambungan, bukan hanya keamanan negara yang akan terjamin, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang akan semakin meningkat. Itulah sebabnya, penting bagi semua pihak untuk terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam upaya membangun proses tugas operasi TNI yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di sisi lain pembangunan

postur TNI untuk mengisi organisasi yang ada di wilayah Papua harus dan terus dilakukan, sehingga pada waktunya oknum masyarakat yang terlibat OPM akan sadar dan bergabung dengan sendirinya. Dengan demikian, tugas operasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.



TNI POLRI melakukan pengawalan pada pembangunan jalan Trans Papua

Dari beberapa langkah di atas, perlu juga adanya pendekatan-pendekatan yang kita tempuh guna lebih menetralsir terjadinya konflik berkelanjutan di Papua yaitu bisa dilakukan dengan pendekatan dialog dan rekonsiliasi. Dimana dapat dilakukan dengan cara memperkuat Otonomi Daerah, memberikan lebih banyak kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan kebijakan lokal sehingga dapat membantu proses pembangunan di wilayah Papua yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mendorong dialog antar semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, kelompok separatis, dan organisasi masyarakat sipil, yang dilakukan secara terbuka dan jujur ini merupakan kunci untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi korban adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan antara Pemerintah dan masyarakat.



Masyarakat dan aparat bergotong royong membangun jembatan

Pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan pemberdayaan ekonomi lokal sangat mendorong proses perkuatan sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, sehingga dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan di Papua dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi generasi mendatang. Membangun Kebangsaan dan Identitas Papua dapat dilakukan dengan penguatan budaya dan bahasa Papua, menghargai dan mempromosikan keberagaman budaya dan bahasa di Papua dapat membantu memperkuat identitas Papua dan meningkatkan rasa bangga dan kedaulatan budaya. Partisipasi masyarakat Papua dan masyarakat yang telah berasimilasi di wilayah Papua harus betul-betul dilaksanakan dengan baik sehingga proses pengambilan keputusan terhadap pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab secara bersama.

Dari berbagai langkah-langkah yang dapat kita tempuh dalam mengatasi konflik di Papua, dapat ditarik kesimpulan bahwa, mengatasi konflik di Papua bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, ada harapan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan jangka panjang di wilayah Papua. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan secara hati-hati dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat Papua itu sendiri, sehingga diharapkan penyelesaian konflik Papua secara holistik menuju Indonesia maju dapat dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

GEODEFENSE SEBAGAI ACUAN GLOBAL SECURITY

Oleh: Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr. (Han)

Direktur Pascasarjana Unhan RI dan Dosen Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI.



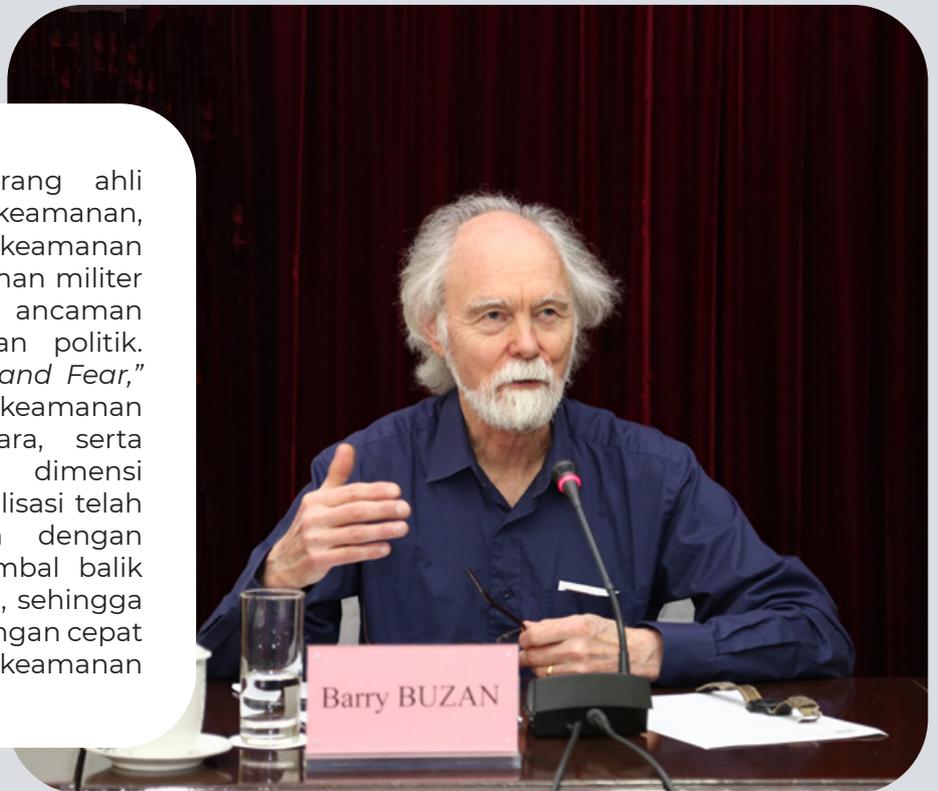
Permasalahan keamanan global semakin kompleks dengan hadirnya berbagai ancaman non-tradisional yang sulit diprediksi dan ditangani. Dinamika geopolitik dunia telah berubah secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dalam menghadapinya perlu sejalan dengan pertahanan. Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan pertahanan yang kuat akan membantu menjaga kestabilan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, pada berbagai kesempatan disampaikan oleh Bapak Menhan RI bahwa penting bagi suatu negara memiliki pertahanan yang kuat. "Kita butuh negara yang aman dan stabil. Untuk negara aman dan stabil, kita perlu pertahanan yang kuat untuk menjaga keutuhan wilayah kita dan kedaulatan Kita."

Konflik regional, perebutan sumber daya, dan rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Salah satu ancaman utama adalah terorisme internasional yang sering kali melibatkan aktor non-negara dengan jaringan global. Selain itu, serangan siber telah menjadi ancaman signifikan bagi keamanan global. Negara dan aktor non-negara terus meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis, sistem keuangan, dan institusi pemerintahan. Serangan ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, disruption layanan publik, dan pencurian data sensitif yang membahayakan privasi individu serta keamanan nasional.



Kerentanan terhadap serangan siber ini memerlukan respons global yang terkoordinasi, dengan kerjasama lintas negara untuk meningkatkan keamanan siber dan berbagi intelijen. Perubahan iklim juga menambah dimensi baru dalam permasalahan keamanan global. Negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim membutuhkan bantuan internasional untuk beradaptasi dan mengurangi risiko ini, menjadikan perubahan iklim sebagai isu keamanan yang mendesak di panggung global.

Barry Buzan (2009), seorang ahli terkemuka dalam studi keamanan, berpendapat bahwa konsep keamanan harus diperluas melampaui ancaman militer tradisional untuk mencakup ancaman ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Dalam bukunya *"People, States, and Fear,"* Buzan menekankan pentingnya keamanan manusia dan keamanan negara, serta interkoneksi antara berbagai dimensi keamanan. Menurut Buzan, globalisasi telah mengubah lanskap keamanan dengan menciptakan ketergantungan timbal balik yang tinggi antara negara-negara, sehingga ancaman di satu wilayah dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi keamanan global.



Zbigniew Brzezinski (1997), seorang pakar strategi internasional, dalam bukunya *"The Grand Chessboard"* menguraikan pentingnya dominasi geopolitik dalam strategi keamanan global. Brzezinski berpendapat bahwa kontrol atas wilayah-wilayah strategis di Eurasia adalah kunci untuk mencapai dominasi global. Menurut Brzezinski, strategi geodefense harus mencakup penguatan aliansi dengan negara-negara kunci di wilayah-wilayah tersebut dan pencegahan dominasi oleh kekuatan rival. Dia juga menekankan pentingnya kehadiran militer yang kuat dan diplomasi yang cermat untuk mengelola konflik dan mengamankan kepentingan nasional dalam konteks global.

Pendapat-pendapat ahli ini menunjukkan bahwa keamanan global dan geodefense memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan analisis geopolitik, strategi militer, teknologi, dan kerjasama internasional untuk menghadapi berbagai ancaman yang kompleks dan saling terkait. Salah satu upaya dalam menjaga keamanan global yakni dengan memahami Geodefense, atau pertahanan geografis, yang mencakup berbagai strategi dan taktik yang digunakan negara untuk melindungi kepentingannya dari ancaman yang muncul dari dinamika geopolitik dan geografis. Penelitian di bidang ini mencakup berbagai aspek, termasuk unsur-unsur militer, ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi keamanan dan stabilitas suatu negara. Geodefense adalah konsep yang tidak hanya relevan tetapi juga esensial dalam konteks keamanan global saat ini. Dengan mengintegrasikan analisis geografis dan geopolitik, serta memanfaatkan teknologi canggih, strategi geodefense dapat memberikan landasan yang kuat untuk merancang kebijakan dan tindakan yang efektif dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan. Oleh karena itu, menjadikan geodefense sebagai acuan dalam upaya keamanan global adalah langkah yang strategis dan visioner untuk memastikan stabilitas dan perdamaian dunia di masa depan.



Tantangan keamanan saat ini tidak hanya datang dari ancaman militer konvensional, tetapi juga dari ancaman non-tradisional seperti terorisme, perubahan iklim, serangan siber, dan pandemi. Geodefense memungkinkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mengembangkan pendekatan multidimensi dalam menghadapi ancaman-ancaman ini, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan politik yang beragam di berbagai wilayah. Keamanan global tidak dapat dicapai oleh satu negara saja. Dibutuhkan kerjasama internasional yang erat, di mana negara-negara bekerja sama untuk mengatasi ancaman bersama. Geodefense menekankan pentingnya aliansi strategis dan kemitraan global, dengan menyoroti wilayah-wilayah yang menjadi titik rawan dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini memungkinkan adanya distribusi sumber daya yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih baik dalam operasi keamanan internasional.

Informasi geodefense dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang potensi ancaman di wilayah mereka dan bagaimana cara menghadapinya. Program pelatihan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan

ancaman lainnya. Dengan memanfaatkan data geodefense yang terbuka, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait keamanan dan pembangunan.



Geodefense memiliki nilai guna yang sangat penting untuk negara dan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi dan data geospasial, geodefense membantu melindungi kedaulatan, meningkatkan keamanan publik, mendukung pembangunan infrastruktur, memperkuat kerjasama internasional, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap berbagai ancaman. Selain itu, geodefense juga memainkan peran kunci dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, menjadikan strategi ini sebagai elemen krusial dalam upaya mewujudkan keamanan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, geodefense tidak hanya memperkuat keamanan nasional tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian dunia.

Secara khusus di Indonesia, geodefense memiliki nilai yang sangat penting mengingat posisi geografisnya yang strategis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Letak Indonesia di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik membuatnya rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk konflik regional, terorisme, bencana alam, dan serangan siber. Penguatan geodefense di Indonesia dapat dicapai melalui langkah-langkah seperti modernisasi angkatan bersenjata, peningkatan infrastruktur dan teknologi pemantauan, serta kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Indonesia juga dapat memanfaatkan geodefense untuk manajemen bencana yang lebih efektif, mengingat frekuensi tinggi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Data geospasial dapat membantu dalam perencanaan evakuasi, penyaluran bantuan, dan rehabilitasi wilayah terdampak. Selain itu, geodefense dapat mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur dengan perencanaan yang lebih baik dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal.

Secara keseluruhan, geodefense adalah strategi yang tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan dan keamanan, tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap berbagai ancaman, baik di tingkat global maupun nasional. Bagi Indonesia, penerapan geodefense yang efektif akan meningkatkan perlindungan terhadap wilayahnya, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan memastikan kesejahteraan serta keamanan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi geodefense dalam kebijakan keamanan nasional adalah langkah strategis yang penting untuk menghadapi tantangan masa depan.



MENGGALI POTENSI HASIL DISERTASI DOKTOR FISIKA POLTEKAD

“ANALISIS PENILAIAN TINGKAT TREMOR TANGAN PETEMBAK
UNTUK MENINGKATKAN AKURASI TEMBAKAN”

Oleh: Brigjen TNI Dr. Rachmat Setiawibawa, S.I.P., M.M., M.Tr. (Han)
(Danpoltekad Kodiklatad)



Politeknik Angkatan Darat (Poltekad) merupakan unsur pelaksana Kodiklatad yang berkedudukan langsung di bawah Dankodiklatad dengan tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan Tinggi vokasi di bidang Ilpengtek Alut Sista Matra Darat. Poltekad selain sebagai lembaga Pendidikan Militer, juga merupakan satu diantara 3 (tiga) lembaga Perguruan Tinggi dilingkungan TNI AD (Akmil, Poltekad dan STHM). Konsekuensi dari status tersebut, mewajibkan Poltekad untuk menyelenggarakan pendidikan dengan berpedoman pada Tri Pola Dasar (Pengetahuan, Jasmani dan Sikku) dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Kewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan persyaratan bagi akreditasi dan salah satu indikator kualitas sebuah Perguruan Tinggi.

Saat ini, Poltekad menyelenggarakan pendidikan vokasi sebanyak 6 (enam) Progam Studi (Prodi) yaitu: 1 (satu) Prodi Magister Terapan S2 Strategi Operasi Darat yang siswanya adalah Pasis Seskoad dan 5 (lima) Prodi Diploma 4 yang siswanya adalah Bintara dari berbagai Kecabangan.

Kelima Prodi Diploma 4 tersebut terdiri dari:

1. Prodi Elkasista (Elektronika Sistem Senjata);
2. Prodi Telkomil (Telekomunikasi Militer);
3. Prodi Otoranpur (Otomotif Kendaraan Tempur);
4. Prodi Terasemil (Teknik Rekayasa Senjata Militer); dan
5. Prodi Rekam Siber (Teknik Rekayasa Keamanan Siber).

Profil Lulusan yang dihasilkan setelah menempuh pendidikan selama 4 (empat) tahun adalah menjadi seorang Teknisi, Asisten Peneliti dan Instruktur yang nantinya siap bertugas diberbagai kecabangan baik di Balakpus, Puscabfung, Lemdik maupun lembaga-lembaga Litbang sesuai dengan kualifikasinya.

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Poltekad dituntut untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitasnya baik dari aspek Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat. Semuanya itu menuntut SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan memiliki profesionalisme serta keunggulan kompetitif. Menjawab tuntutan tersebut, Poltekad baik secara kelembagaan maupun personal terus memotivasi para dosennya untuk selalu mengembangkan dirinya melalui peningkatan pendidikan akademis (program sertifikasi dan perkuliahan) diberbagai Perguruan Tinggi serta melaksanakan penelitian baik secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lainnya. Dalam 1 (satu) tahun terakhir ini, peningkatan pendidikan akademis melalui jenjang perkuliahan secara mandiri telah membuahkan hasil yang cukup Signifikan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat motivasi dosen untuk mengembangkan kualitasnya.

Rekapitilasi Personel Poltekad yang melanjutkan Pendidikan umum S2 dan S3 (2023 s.d 2024) secara Mandiri

NO	GOLONGAN	ABITUREN	MENGIKUTI PENDIDIKAN		ALUMNI
			S2	S3	
1	Bintara		6	-	Poltekad
2	Pama	Abit Sepa PK	1	-	
		Abit Secapa	3	5	Poltekad
3	Pamen	Abit Sepa PK	-	1	
		Abit Secapa	-	3	Poltekad
Jumlah			10	9	

Selain melalui peningkatan pendidikan akademis, berbagai penelitian yang dilaksanakan Poltekad baik oleh dosen, mahasiswa maupun kolaborasi antara dosen dan mahasiswa menunjukkan hasil yang luar biasa. Berbagai perlombaan KTI (Karya Tulis Ilmiah) dan KCT (Karya Cipta Teknologi) di lingkungan TNI, lomba inovasi teknologi antar kampus menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Salah satu hasil penelitian yang luar biasa dan cukup memberikan manfaat signifikan bagi TNI adalah penelitian tentang ANALISIS PENILAIAN TINGKAT TREMOR TANGAN PETEMBAK UNTUK MENINGKATKAN AKURASI TEMBAKAN. Penelitian tersebut dilakukan oleh Lettu Arh Dr. Jeki Saputra, S.T., M.T.



Penelitian Alat Pendeteksi Tremor Tangan Petembak oleh Lettu Arh Dr. Jeki Saputra, S.T., M.T

Karier militer Lettu Arh Dr. Jeki Saputra, S.T., M.T. berawal dari seorang lulusan Bintara PK XI tahun 2004, yang dalam perjalanan kariernya telah mengikuti pendidikan D4 di Poltekad. Setelah lulus Secapa tahun 2019, yang bersangkutan ditempatkan di Poltekad dan melanjutkan Pendidikan S2 secara mandiri di Universitas Brawijaya pada jurusan Teknik Elektro. Ditengah kesibukannya sebagai seorang Dosen dan dengan segala keterbatasan secara finansial, tidak menyurutkan tekad, semangat dan motivasinya untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi pada Program Doktorat dibidang Fisika dengan minat Fisika Instrumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA UB) Universitas Brawijaya. Perjalanan panjang dan berliku akhirnya dilewati dengan penuh ketabahan. Akhirnya setelah 2 tahun 10 bulan, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2024, Lettu Arh Jeki diwisuda menjadi seorang Doktor dengan predikat Cum Laude (IPK 3.81) dan menjadi wisudawan terbaik. **Dia tercatat sebagai Doktor Fisika Pertama di TNI AD.**



Prosesi Sidang Terbuka dan Wisuda Lettu Arh Dr. Jeki Saputra, S.T., M.T.

Penelitian disertasi yang diangkat oleh Lettu Arh Dr. Jeki Saputra, S.T., M.T. berkaitan dengan kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap prajurit TNI yaitu keahlian dan kemahiran dalam menembak. Kompetensi ini dapat dicapai melalui latihan yang intensif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan latihan menembak senjata ringan khususnya senjata laras panjang, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebelum menembak. Salah satu tahapan tersebut adalah bidik kering. Bidik kering dilakukan untuk melatih cara membidik yang benar sehingga mencapai tingkat akurasi tembakan yang baik dan tepat sasaran. Setelah latihan bidik kering, dilanjutkan dengan latihan menembak dengan diawali tembakan koreksi. Tembakan koreksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana nafas, bidikan dan tarikan picu penembak dilihat dari hasil perkenaan pada jarak 15 meter.

Hal yang sangat penting dan mendasar agar perkenaannya akurat dan presisi, maka yang perlu diperhatikan adalah (NABITEPI) yang merupakan akronim dari nafas, bidik, terbidik selanjutnya tarik picu. Hal yang sering tidak disadari oleh prajurit dalam latihan menembak adalah teknik mengatur nafas dan menarik picu. Pengaturan nafas dan tarikan picu yang kurang stabil akan menyebabkan terjadinya getaran yang dapat mempengaruhi hasil perkenaan tembakan. Ketika salah satu dari keempat faktor di atas kurang baik, maka hasil perkenaan tembakan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, keempat faktor ini sangat berpengaruh terhadap hasil perkenaan tembakan.

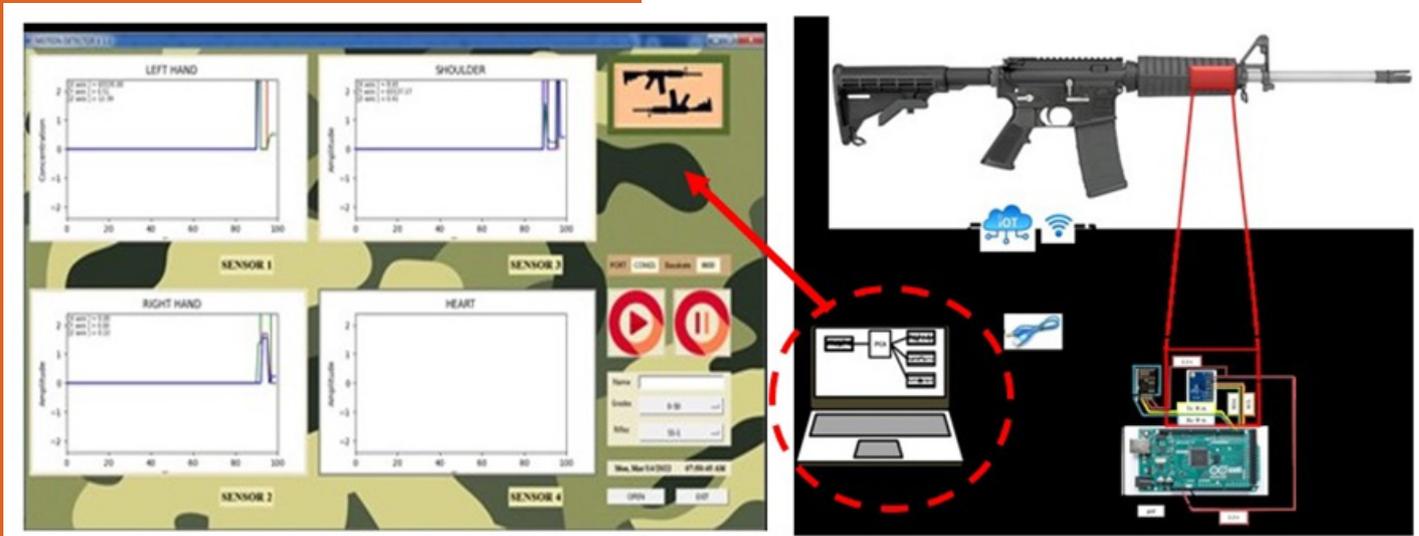
Tahapan latihan membidik, telah dilatihkan ketika kita melaksanakan latihan bidik kering, sedangkan latihan nafas dan tarikan picu dilatihkan ketika kita melaksanakan tembakan koreksi. Pada tahapan tembakan koreksi, untuk melihat baik tidaknya nafas dan tarikan picu seorang penembak, harus menggunakan munisi yang sebenarnya (tajam) dan setelah melakukan penembakan, penembak maju kedepan untuk mengetahui hasil perkenaan. Tembakan koreksi dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu sesi tembakan. Jika sesi pertama tembakan koreksi belum lulus, maka sebenarnya penembak belum memenuhi syarat untuk melakukan tembakan penilaian sehingga diharuskan untuk mengulangnya kembali sampai hasil tembakan koreksinya lulus dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tembakan penilaian. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya nafas dan tarikan picu penembak dapat diketahui setelah penembakan menggunakan munisi sebenarnya (tajam). Artinya dibutuhkan banyak munisi untuk mengetahui baik tidaknya pengaturan nafas dan tarikan picu seorang penembak. Hal tersebut tentunya akan menjadi persoalan tersendiri, karena adanya beberapa aspek nilai yang tidak efektif dan tidak efisien yaitu : a. Aspek Waktu, dimana seorang penembak harus berkali-kali ke depan menuju lesan tembak untuk melihat hasil perkenaan tembakan sampai hasilnya baik; b. Aspek Tenaga, dimana banyak energi yang dibutuhkan mulai dari awal penembakan sampai hasil akhir tembakan koreksi; c. Aspek Anggaran, dimana banyaknya munisi yang akan terbuang apabila tembakan koreksi belum lulus.

Dari penjelasan di samping, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan mekanisme dan teknik menembak koreksi tersebut tergolong konvensional sehingga perlu adanya perubahan teknis yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi namun tidak merubah maksud dan tujuan serta esensi dari tembakan koreksi. Dalam penelitiannya, Lettu Arh Dr. Jeki Saputra, S.T., M.T. mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan fokus penelitian pada "Besarnya pengaruh getaran yang disebabkan oleh nafas dan tarikan picu pada seorang petembak". Penelitian tersebut berkaitan dengan alat instrumentasi yang berfungsi untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi getaran yang terjadi pada saat membidik dan menarik picu sebelum melakukan penembakan. Dengan adanya alat ini, diharapkan dapat mengefektifkan waktu dan tenaga serta yang lebih signifikan lagi adalah mengefisiensikan anggaran dengan meminimalisir pengeluaran munisi saat menembak koreksi. Berikut ini, dijelaskan secara singkat tentang Tahapan Desain Sistem Deteksi Getaran.

Tahapan Mendesain Sistem Deteksi Getaran Dengan Sensor Accelerometer Jenis ADXL 345

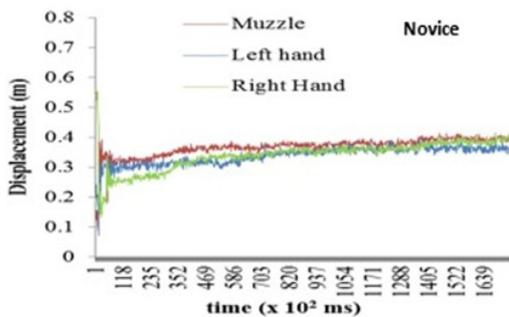
Tahapan ini dilakukan dengan mendesain sistem utama dimana sistem tersebut dibuat menggunakan Mikrocontroller Arduino dan Sensor Getaran Accelerometer Jenis ADXL345. Penelitian tersebut menghasilkan suatu alat instrumentasi yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan munisi pada saat latihan menembak. Sistem didesain dengan menggunakan tiga buah sensor dimana tampilan pada layar monitor terlihat berupa bentuk getaran baik yang timbul dari gerakan naik turun, maju mundur dan kanan kiri dari senjata pada saat membidik.

Sinyal keluaran yang dihasilkan sistem ditampilkan dalam aplikasi Python dan disimpan dalam format CSV. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis data dari tiga sensor yang diletakkan pada lade senjata, tangan kiri dan tangan kanan. Dalam keadaan posisi tiarap atau Prone, sistem ini berhasil secara efisien mengenali pergerakan tangan yang diukur dalam bentuk percepatan dalam tiga posisi sensor yang berbeda. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan tiga bentuk sinyal getaran dari ketiga sensor untuk menggambarkan hasil pengukuran dari tangan kiri (warna oranye), tangan kanan (warna kuning), dan laras senjata (warna biru). Dari ketiga posisi sensor, output sensor yang diletakkan pada lade senjata menunjukkan bentuk sinyal getaran paling kurang stabil, sedangkan sensor yang diletakkan pada tangan kiri dan tangan kanan cenderung stabil. Artinya getaran yang ditimbulkan oleh nafas dan tarikan picu akan sangat terlihat ketika alat pendeteksi getaran diletakkan pada lade senjata.

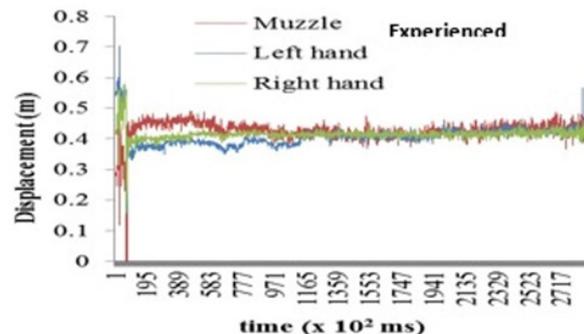


Desain dan sinyal keluaran yang dihasilkan sistem ditampilkan dalam Aplikasi Phyton dan disimpan dalam format CSV

Petembak Pemula



Petembak Ahli



Setelah menganalisa data getaran dari ketiga posisi sensor, tahapan terakhir adalah membandingkan bentuk getaran antara penembak ahli dengan penembak pemula (yang hasil tembakkannya kurang bagus). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola pergeseran getaran antara penembak ahli dengan penembak pemula dimana hasil grafik sinyal getarannya menunjukkan ketegantungan pada gerakan tubuh secara menyeluruh untuk mengatasi tremor dan pergeseran. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengalaman dan kontrol motorik yang lebih rendah dalam menangani kondisi menembak sedangkan untuk penembak ahli, bentuk getarannya lebih stabil dan cenderung kecil.

Berdasarkan hasil penelitian dihadapkan dengan kepentingan latihan menembak, maka alat instrumentasi tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi getaran tremor pada saat latihan menembak yang sejalan dengan maksud dan tujuan dari latihan menembak koreksi. Oleh karena itu, alat instrumentasi tremor tersebut dapat digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan latihan menembak di jajaran TNI AD. Dengan demikian pemanfaatan teknologi di atas dapat meningkatkan efektifitas penggunaan waktu dan tenaga serta mengefisienkan penggunaan munisi dan anggaran.

Nilai Strategis Alat Pendeteksi Tremor Tangan Petembak Dalam Meningkatkan Akurasi Tembakan

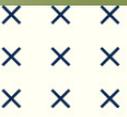
Pendeteksian tremor petembak memiliki nilai strategis dalam mendukung latihan menembak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat dan nilai strategis alat tersebut bagi prajurit antara lain : a. Meningkatkan presisi, dimana alat ini dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi gerakan tremor atau getaran tubuh saat menembak; b. Mengurangi kelengkungan (Wobble), dimana alat ini dapat membantu mengurangi kelengkungan atau gerakan yang terjadi pada bidang pandang senjata; c. Meningkatkan efisiensi latihan, dimana alat ini dapat membantu efisiensi penembakan karena memungkinkan prajurit akan melakukan penembakan setelah nafasnya sudah stabil; d. Meningkatkan konsistensi, dimana alat ini dapat membantu meningkatkan konsistensi kinerja menembak dengan menyediakan umpan balik yang konsisten terkait dengan gerakan tubuh dan kontrol tembakan; e. Mengevaluasi kinerja, dimana alat ini dapat merekam dan mengevaluasi kinerja prajurit selama latihan menembak; f. Mengembangkan keterampilan, dimana alat ini dapat membantu prajurit untuk mengatasi tremor dan getaran yang tidak diinginkan.

Pentingnya mendeteksi tremor sejak dini tidak hanya berguna bagi efisiensi penggunaan munisi namun juga berguna bagi personal individu prajurit. Berikut ini disampaikan beberapa pemahaman tentang tremor bagi individu prajurit sebagai berikut:

Tremor dapat menimbulkan efek negatif dalam latihan menembak; b. Tremor bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelelahan, stres, kondisi medis tertentu atau konsumsi kafein; c. Latihan teratur dapat mengurangi tremor dengan meningkatkan kekuatan dan kontrol otot. Latihan yang terfokus pada stabilisasi dan kontrol gerakan tangan dan lengan dapat membantu mengurangi tremor; d. Teknik pernapasan yang baik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kontrol tubuh; e. Latihan pernapasan, peregangan ringan dan pemanasan otot yang cukup dapat membantu mengurangi kemungkinan tremor saat mulai latihan; f. Teknik dan posisi yang benar saat menembak dapat membantu mengurangi getaran; dan g. Berkonsultasi dengan dokter berguna untuk mengevaluasi tingkat tremor yang tinggi.

Kami berharap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Lettu Arh Dr. Jeki Saputra, S.T., M.T. dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk berkarya. Jangan pernah ragu untuk memulai, teruskan berkarya untuk kejayaan TNI AD. Mulailah dari hal-hal yang kecil untuk menjadi sesuatu yang besar.

Pepatah dari seorang filosofi Tiongkok yang bernama Lao Tzu mengatakan "Perjalanan ribuan mile dimulai dari satu langkah maka sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil"



PROGRAM UNGGULAN KETAHANAN PANGAN KODAM IM



**I'M
JAGONG**





**Oleh: Kolonel Inf Budi Rahmawan
(Aster Kasdam Iskandar Muda)**

Krisis pangan Global melanda berbagai negara pada tahun 2023 akibat dari permasalahan ekonomi, tingginya harga pupuk, konflik serta cuaca ekstrim. Bahkan World Food Program (WFP) atau Program Pangan Dunia mencatat, lebih dari 78 negara dan 333 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut. Berdasarkan data BPS menunjukkan Petani di Indonesia semakin menua dalam satu dekade terakhir dimana Proporsi pengelola pertanian berusia 55-65 tahun meningkat dari 20 persen di tahun 2013 menjadi 23,3 persen pada 2023 dan petani usia 65 tahun ke atas meningkat dari 12,75 persen menjadi 16,15 Perse. Sementara itu selama 2018-2023 luas lahan pertanian menciut 648.800 Ha. Maka melalui UU No 34 Th 2004 ttg TNI psl 7 ayat 2 dan 3 bahwa tupok TNI dilaksanakan salah satunya dengan OMSP diantaranya dengan pemberdayaan wilhan dan membantu tugas pemerintah di daerah, selain itu juga MoU Panglima TNI dengan Mentan tgl 15 Jan 2024 tentang pendampingan percepatan tanam atau gerakan tanam peningkatan produksi pangan, kemudian ST Kasad No ST/3039/XI/2023 tgl 15 Nov 2023 tentang perintah untuk melaksanakan pendampingan percepatan tanam atau gerakan tanam peningkatan produksi pangan terutama padi dan jagung di wilayahnya telah menjadikan dasar bahwa TNI AD serta Kodam harus turut serta membantu pemerintah mengatasi krisis pangan.

Selain itu pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, telah berkomitmen dan menegaskan bahwa perlu kehadiran negara untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Selain itu isu tentang anomali cuaca dimana terjadinya elnino (musim panas yang berkepanjangan) dan elnina (musim hujan yang berkepanjangan), sehingga hal tersebut berpengaruh dengan ketersediaan pangan, meledaknya OPT (organisme pengganggu tanaman) dan menurunnya hasil panen sehingga menjadi ancaman pangan nasional. Melihat dalam sistem ekonomi pasar, jika hasil panen suatu komoditi jumlahnya sedikit sedangkan permintaan banyak, maka yang akan terjadi adalah harga komoditi tersebut semakin mahal, sebaliknya akan terjadi harga murah atau stabil jika permintaan dengan ketersediaan barang seimbang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, karena situasi tersebut mengakibatkan Inflasi di tingkat kabupaten/kota khususnya provinsi Aceh dengan jumlah populasi 5,52 juta jiwa penduduk dan jumlah lahan pertanian yang sangat luas ternyata belum mampu memproduksi bahan pangan utama untuk skala konsumsi lokal, sehingga hal tersebut berdampak pada inflasi bahan pangan pokok di Aceh. Sumber daya manusia (petani) dalam hal ini juga perlu diperhatikan, dengan berkurangnya tenaga kerja dan minat untuk menjadi petani mengakibatkan tehnik budidaya modern belum bisa diadopsi dengan baik di lapangan. Belum lagi tantangan lahan pertanian semakin menyusut, ditambah lagi petani penggarap juga berkurang dibandingkan petani pemilik lahan, yang mana lahan (skala luas) pribadi milik petani lebih diprioritaskan untuk komoditi perkebunan. Dalam hal ini tentunya diperlukan penambahan petani baru serta pembangunan sumber daya manusia berupa petani milenial, petani yang adaptif terhadap teknologi digital serta mampu menggunakan alat mesin pertanian modern, penggunaan internet, drone dan bahkan kecerdasan buatan.

Di sisi lain petani di Aceh secara umumnya lebih menyukai komoditi tanaman perkebunan (karet, kelapa sawit, kopi, pinang, kakao) untuk ditanam di lahannya, dikarenakan secara ekonomi harga jual stabil, perawatan tidak terlalu rumit, dan masa panen lebih lama, berbeda jika lahan yang ada ditanami tanaman Jagung, butuh biaya saprodi (pengolahan lahan, benih, pupuk, pestisida) dalam jumlah yang banyak ditambah lagi harga jual yang tidak stabil. Bisa kita lihat, banyaknya lahan tidur terlantar yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh petani setempat. Penyebabnya mungkin, kurangnya modal dan biaya saprodi yang sekarang cukup mahal mengakibatkan peluang lahan garapan yang tersebar luas di sia-siakan tanpa dimanfaatkan dengan maksimal.

Angka kemiskinan di Provinsi Aceh menurut data terakhir dari BPS (Badan Pusat Statistik) di bulan Maret 2023 berjumlah 806.750 orang. Angka tersebut relatif besar, dipicu oleh kenaikan harga komoditi pangan dan barang konsumsi lainnya di tengah masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah. Hal ini menjadi perhatian khusus guna mencari solusi agar perekonomian masyarakat kalangan bawah bisa stabil, salah satu cara adalah melaksanakan berbagai program ketahanan pangan. Secara peringkat nasional Provinsi Aceh masih jauh di bawah provinsi lainnya dalam hal sebagai penyumbang jagung, di mana menurut sumber BSIP (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh) pada tahun 2023 hasil panen jagung pipilan sejumlah 68,24 ribu ton. Angka ini berkurang (4 ton) jika dibandingkan dengan data di tahun 2022 sejumlah 72,24 ribu ton, dan diperkirakan akan terus stagnan atau menurun seiring dengan tantangan iklim global juga faktor eksternal lainnya. Sementara itu, ketergantungan pasokan pangan pokok di Aceh hampir seluruhnya berasal dari Medan, hal ini disebabkan karena produktivitas sejumlah bahan pangan di Aceh kurang memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Diharapkan kedepan melalui kebijakan, pemerintah bisa fokus ke pembangunan sektor riil atau sektor yang benar-benar terkait dengan produksi pertanian. Dengan mengarahkan belanja modal untuk



Panen Jagung



Alsintan (alat mesin pertanian) dan juga pembiayaan di sektor hulu berupa saprodi (benih, pupuk, pestisida), di dukung juga dengan dibangunnya jalan usaha tani yang bisa menghubungkan kawasan sentra produksi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka Pangdam Iskandar Muda kala itu (Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P.) membuat gagasan, menyusun konsep, serta strategi Program Unggulan Ketahanan Pangan Kodam IM (I'M Jagong) atau Iskandar Muda Jagung yang dicanangkan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 bertepatan dengan (17 Ramadhan 1444 H). Nama ini juga merupakan pertama kali di website dan pencarian Google.



Pangdam IM Bersama Ibu Ketua Persit KCK PD IM melaksanakan Panen jagung Tahap 1 Program I'M Jagong di Kecamatan Sawang Aceh Utara

Adapun Program I'M Jagong dimaksudkan mencapai sasaran utama menanam jagung untuk menuju Aceh melimpah jagung untuk kesejahteraan masyarakat. Sasaran kedua yaitu terbentuknya petani-petani baru milenial yang belum memiliki pekerjaan untuk dapat menjadi petani milenial yang berpengalaman, mampu mengadopsi sistem pertanian moderen (*smart farming*) untuk mencapai produksi yang maksimal di lapangan dan hasil panen yang bermutu. Serta menarik eks kombatan yang tersebar di seluruh wilayah Aceh dapat bergabung dalam kelompok Tani I'M Jagong sebagai kelompok tani (poktan) baru yang bertujuan agar kegiatan pertanian bisa lebih bergairah, banyak peminat dan terorganisasi dengan baik.

Hilirisasi industri jagung menjadi sasaran ketiga yang dituju karena sangat penting sebagai proses nilai tambah komoditi jagung, ini menjadi kunci kesejahteraan bagi petani, karena selama ini petani cenderung menjual

produknya secara langsung saat panen, tanpa mengolahnya dulu menjadi produk yang bernilai jual seperti pakan ternak dan produk turunannya, sehingga keuntungan yang diterimanya lebih kecil.

Pengendalian inflasi di tingkat daerah juga menjadi salah satu strategi dalam program I'M Jagong, pemerintah atau otoritas kebijakan tingkat lokal atau regional harus terlibat aktif untuk mengelola laju inflasi tanaman pangan dan Program I'M Jagong diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengendalikan Inflasi di Provinsi aceh. Hal ini sangat berhubungan dengan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan terkendalinya inflasi harga pangan maka pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat bisa stabil kembali.

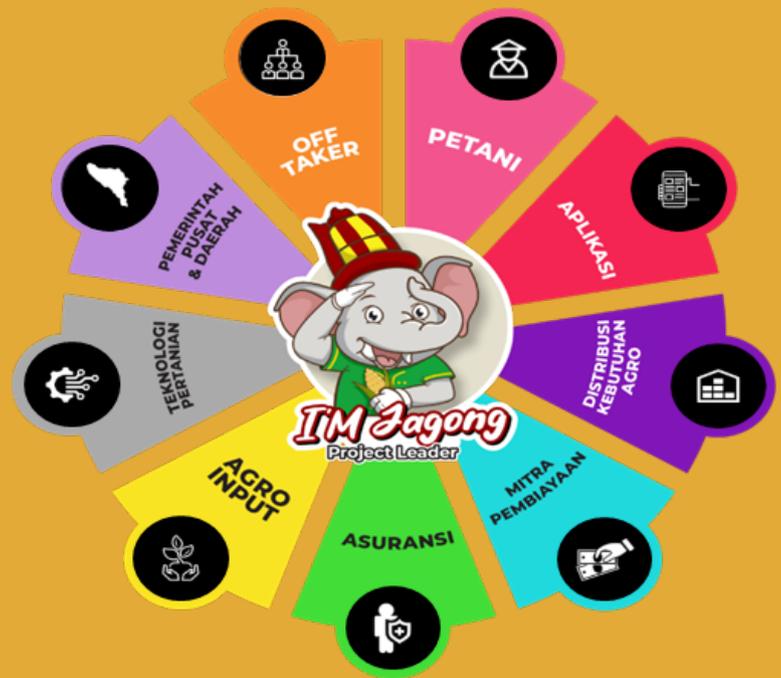
Selanjutnya sasaran ketujuh program Pangdam IM (I'M Jagong) yaitu, terciptanya lapangan kerja dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terciptanya beberapa produk

olahan dari jagung, diantaranya tepung maizena terbuat dari pati yang berada di dalam jagung atau produk olahan makanan ringan yang digemari di pasaran. Dari semua sasaran program I'M Jagong tersebut di atas kiranya dapat dicapai dengan baik, dengan melibatkan seluruh elemen utama di lapangan, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan petani setempat.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Program I'M Jagong, Kodam Iskandar Muda membentuk struktur organisasi yang dikomandoi langsung oleh Pangdam IM sebagai Ketua, Kapoksahli Pangdam IM sebagai Ketua Pelaksana dan Aster Kasdam IM sebagai Koordinator Lapangan yang membawahi Danrem, Dandim dan Babinsa serta kelompok Tani di setiap wilayah di Koramil agar terbentuk satu visi. Program I'M Jagong dibentuk dengan konsep melalui 9 langkah atau 9 pedoman yang saling terkait yang dinamai konsep sosio ekonomi. Konsep sosio ekonomi yang digagas oleh Pangdam IM ini pada dasarnya lebih kepada meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bersifat sosial atau memberi dan tidak mengejar pada keuntungan yang bersifat pribadi atau pada organisasi. Konsep sosio ekonomi yang telah dirancang melalui 9 langkah berputar dan dari hulu ke hilir sebagai berikut : 1) Langkah pertama (petani). Sasaran adalah terbentuknya petani dan kelompok tani baru penanam jagung yang berisi para petani awam yang memiliki lahan produktif namun belum dikelola secara intensif. 2) Langkah kedua (Aplikasi). Program I'M Jagong memiliki aplikasi sendiri yang dapat mendata petani Jagong untuk di daftar di satuan aplikasi I'M Jagong. Dalam aplikasi tersebut juga dapat terdata perkembangan tanaman jagung, harga jagung dan informasi pasca panen, juga terdapat informasi pendukung lainnya yang mendukung Program I'M jagong. 3) Langkah ketiga (Distribusi kebutuhan Agro). Saprodi (pupuk dan benih) diberikan bantuan oleh Program I'M Jagong kepada para petani yang sudah terdaftar di dalam satuan I'M Jagong, sehingga bantuan tepat sasaran dan tersalurkan sesuai kebutuhan di

lapangan. 4) Langkah ke empat (Mitra pembiayaan). Perusahaan nasional seperti Pupuk Indonesia dan perusahaan nasional lainnya serta perusahaan lokal aceh (BUMD) diharapkan dan juga dilibatkan sebagai mitra yang dapat memberikan kontribusi berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*), kepada masyarakat melalui Program I'M Jagong. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masalah-masalah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. 5) Langkah kelima (Asuransi). Untuk jaminan panen dan pasca panen, petani juga didaftarkan pada asuransi pertanian jagung milik Negara (BUMN), bertujuan untuk melindungi petani ketika gagal panen (banjir, serangan hama penyakit dll.). Jasindo salah satu diantara penyedia perlindungan resiko yang sering melayani petani di lapangan, yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Tani Jagung (AUTJ). 6) Langkah ke Enam (Agro Input). Kerjasama juga sudah terjalin dengan pihak BSIP (Badan Standarnisasi Instrument Pertanian), lembaga ini bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi di daerah. Badan ini juga sebagai pendamping dalam Pendidikan pelatihan dan operasional Program I'M Jagong. 7) Langkah ke tujuh (Teknologi Pertanian). Program I'M jagong berbasis pada teknologi pertanian dan teknologi pendukung yang berfungsi sebagai monitoring sistem pertanian Jagong dari hulu ke hilir, mengingat sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi. Penggunaan Drone untuk pertanian selain juga dilakukan untuk penggunaan teknologi terkini dalam pelaksanaan pemetaan di lapangan. Penggunaan dukungan alat berat dan Alsintan (traktor roda empat, hand traktor, mesin pengering jagung) bertujuan untuk memberikan kemudahan serta lebih mengurangi biaya produksi. 8) Langkah kedelapan (Pemerintah Pusat dan Daerah). Pemerintah pusat melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan, melalui pelaksanaan pendataan lokasi lahan, jumlah kelompok tani yang

terdata di bawah Distanpan Kabupaten/Kota dan melakukan pendampingan teknis melalui penyuluh pertanian lapangan yang tersebar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan. 9) Langkah kesembilan (*Off Taker*). Program I'M Jagong berperan sebagai pengambil dan pembeli awal pada saat panen jagung, selanjutnya mencari pasar yang potensial dengan harga menguntungkan. Selain itu untuk menjadi off taker Program I'M Jagong harus mencapai hilirisasi jagung dengan mulai mewujudkan pembangunan pabrik jagung dan pakan ternak di Aceh serta menciptakan industri turunan jagung untuk membantu produk UMKM, sehingga berdampak positif bagi ketersediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Strategi yang dilakukan dalam Program I'M Jagong agar konsep sosio ekonomi berjalan yaitu, melalui strategi tanam tersebar, di mana setiap koramil (222 koramil di bawah Kodam IM) di kecamatan menggerakkan tanam Jagong dengan target seluas 5 Ha di wilayah masing-masing atau setiap kecamatan di Provinsi Aceh, juga memanfaatkan seluruh lahan tidur milik TNI AD, baik yang berada di satuan kewilayahan maupun satuan non kewilayahan (Satpur). Strategi ini dilakukan dihadapkan dengan faktor pertimbangan serta berdasarkan sasaran output yang telah dijelaskan di atas dan outcome sebagai lumbung dan kesiapan logistik wilayah menghadapi operasi gerilya dalam konsep operasi pertahanan serta pertimbangan penting lainnya sebagai berikut : 1) Untuk memberikan contoh secara massif di seluruh wilayah Aceh terhadap masyarakat akan keuntungan menanam jagung serta menarik petani milenial bergabung dalam Program I'M Jagong. 2) Menggerakkan tanam tanam jagung secara massif serta Program I'M Jagong menyentuh di seluruh wilayah Aceh. 3) Mencegah hama dan hewan liar

serta menghindari kerugian yang lebih besar. 4) Memudahkan pengawasan terhadap lahan tanam serta masih kurangnya kelompok Tani yang terbentuk. 5) Kurangnya sarana dan prasarana serta alsintan untuk produksi tanam yang dimiliki dan hanya mampu melaksanakan secara manual pada lahan yang tidak luas.

Strategi tanam tersebar yang dilakukan agar tidak membebani satuan dan program kerja maka dilakukan secara bertahap. Data tanam tersebar yang telah dilakukan pada Tahap I yaitu menanam jagung tersebar di wilayah Kodim - Kodim jajaran total luas lahan 64 Ha dengan bibit Pioner P32 dan pengadaan pupuk disiapkan dan dibantu secara pribadi oleh Pangdam IM. Hasil awal pada tahap I dengan tanam perdana ini menghasilkan produktivitas 5,6 ton/Ha meskipun secara nasional produktivitas mencapai 7,2 Ton per/ha namun demikian penanaman jagung ini sudah sangat berhasil karena ditanam pada lahan baru. Peningkatan produktivitas akan dicapai dalam masa tanam ketiga akibat dari kesiapan lahan yang semakin gembur sebagai akibat

pengolahan serta PH tanah yang telah normal. Dengan keberhasilan pada Tahap 1 Program I'M jagung melanjutkan penanam pada Tanam tahap II, total luas lahan 527,9 Ha, dukungan bibit Pioneer P35 oleh Kementan dan pupuk oleh Pangdam IM. Penanaman pada tahap kedua ini juga telah merambah serta bekerja sama dengan perusahaan perkebunan sawit daerah dengan melaksanakan tanam tumpang sari di lahan-lahan sawit yang masih baru tanam atau berumur kurang dari 5 tahun. Tanam tumpang sari dilahan PT ASN seluas 50 Ha telah mencapai produktivitas 7 ton/Ha dan telah di panen bersama dengan jajaran direksi PT ASN beserta Pangdam IM. Tanam tahap III, total 305 Ha, dukungan bibit Pioneer P35 oleh Kementan dan pupuk oleh Pangdam IM. Dengan keberhasilan pada tiga tahap yang telah dilalui Pangdam IM melalui program I'M Jagung membuat terobosan baru bagi perkembangan I'M Jagong dengan telah mencoba membuat dan memproses bibit jagung sendiri yang diberi nama Bibit jagung Tongkol 2 serta membuat dan memproduksi sendiri pupuk buatan sendiri dengan dua varian yaitu Pupuk NHP Vegetatif dan NHP generative yang bisa digunakan oleh berbagai tanaman. Dalam rangka uji coba pupuk dan bibit buatan Program I'M Jagong, Pangdam IM membuat lahan percontohan bagi setiap Kodim agar menanam 2 Ha serta Satnonkowi 1 Ha dengan total luas 50 Ha. Uji coba saat ini dengan bibit tongkol 2 serta pupuk NHP vegetative dan generative masih dalam tahap melihat perkembangan pertumbuhan tanaman. Dimana uji coba tanam perdana Bibit hasil pengembangan program I'M Jagong dilakukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Amran Sulaiman saat berkunjung ke Provinsi Aceh sekaligus melakukan panen serentak terhadap hasil Tanam Tahap 2 di lahan Yonif 112 seluas 5 Ha. Pada kesempatan tersebut Menteri



Pangdam IM Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya bersama Menteri Pertanian RI Bapak Dr. Amran Sulaiman dan Gubernur Aceh Panen Jagong dalam program I'M Jagong di lahan Yonif 112

pertanian menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada Kodam IM melalui Program I'M Jagong serta menobatkan Pangdam I'M Mayjen TNI Novi Helmi Prasetya sebagai Pangdam Terbaik di bidang Ketahanan Pangan yang disampaikan secara langsung dihadapan para wartawan serta diliput diberbagai media baik cetak maupun elektronik.

Guna menjamin keberlangsungan Program I'M Jagong maka dibentuk Diklat Pertanian dan Peternakan di wilayah Kodim Nagan Raya untuk memberikan bekal bagi petani baru milenial dan babinsa yang akan menanam jagung. Diklat ini telah berlangsung dengan beberapa gelombang. Gelombang I (desember 2023) diikuti jumlah peserta 103 orang (TNI 100, brimob 2, masyarakat 1). Di awal 2024 dilakukan penyiapan lahan dan pelatihan pertanian gelombang II dengan peserta 97 orang (babinsa 57, petani 19, eks kombatan 19, brimob 2) lanjut ke Februari 2024 dan diklat pertanian gelombang III diikuti peserta 95 orang (babinsa 19, santri 76). Diklat ini telah menyentuh berbagai kalangan untuk kesejahteraan dan mengurangi pengangguran dari Eks Combatan, masyarakat pemuda dan bahkan kalangan santri. Fasilitas diklat

telah terintegrasi diantaranya terdapat balai tempat belajar, demplot peternakan, demplot perikanan, demplot pertanian, balai produksi pakan, balai produksi pupuk dan rumah tinggal peserta, semua unit kegiatan tersebut dalam satu luasan lahan dan semuanya difungsikan sesuai kebutuhan peserta, nantinya diharapkan setelah selesai mengikuti diklat peserta bisa memahami dan mengetahui budidaya pertanian dan peternakan secara terpadu.



Menteri Pertanian RI Bersama Pangdam IM melaksanakan tanam perdana uji coba bibit jagung tongkol 2 pengembangan Program I'M Jagong



Menteri Pertanian RI Bersama Pangdam IM bertemu dengan kelompok Tani se Prov. Aceh.

Akhir dari strategi tanam dan hasil tanam adalah tercipta hilirisasi industri, jagung yaitu pelaksanaan pembuatan pabrik jagung dan pakan ternak yang sedang direncanakan dan dalam proses penyiapan lahan dan gambar desain pabrik dengan luasan lahan 3 Ha berlokasi di kabupaten Nagan Raya. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu konsep budidaya pertanian untuk menghasilkan nilai jual yang tinggi dan meningkatkan daya saing produksi juga pendapatan petani, dengan adanya pabrik pengolahan maka diharapkan bisa mengangkat taraf hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Program I'M Jagong menargetkan capaian luas lahan garapan yang tersebar seluas 3000 Ha, selain itu juga produk mandiri I'M Jagong berupa bibit, pupuk dan kesiapan Alsintan menjadi satu faktor penentu dalam berjalannya program di lapangan, sehingga target realisasi bisa berjalan

sesuai dengan perencanaan. Kemudian target akhir yaitu, (Program I'M Jagong) dengan dibangunnya pabrik jagung dan pabrik pakan ternak dan perikanan bisa menjadi awal kebangkitan industri hilirisasi di Aceh, dan dengan terlengkapinya semua komponen perencanaan diatas maka diharapkan Provinsi Aceh bisa meraih daerah Surplus Jagong.

Program Unggulan Ketahanan Pangan Kodam IM (I'M Jagong) merupakan satu inovasi baru anak bangsa, yang mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional, agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Dari struktur pelaksanaan yang sangat mendetail, konsep dan strategi yang disusun secara cermat, dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan di dukung kesiapan personel dilapangan, maka kami sangat yakin segala kendala yang dijumpai di lapangan nantinya akan bisa diselesaikan dengan solusi yang terbaik, sehingga target capaian dari keseluruhan program bisa mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan serta menghasilkan *output* kepentingan satuan dan masyarakat serta *outcome* bagi kepentingan operasi militer.

Saran dan masukan juga sangat kami harapkan dari para tokoh pembangunan pertanian, agar kiranya keberhasilan yang ingin kita capai dapat lebih mudah dan cepat terwujud serta merupakan keberhasilan bersama yang dapat menginspirasi pembaca untuk dapat menerapkan di wilayah masing-masing.

YKEP UNTUK KESEJAHTERAAN KELUARGA BESAR TNI ANGKATAN DARAT



Oleh: Brigjen TNI (Purn) Abdul Karim
Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hublem YKEP

Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya yayasan yang transparan, maju dan profesional guna mendukung kesejahteraan dan mencerdaskan Keluarga Besar Angkatan Darat khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi

Dalam perjalanannya, misi Yayasan Kartika Eka Paksi berkembang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan bagi Keluarga Besar Angkatan Darat, melainkan juga mencerdaskan kehidupan Keluarga Besar Angkatan Darat dan masyarakat umum lainnya, perkembangan misi Yayasan Kartika Eka Paksi adalah:

- Mengembangkan dan meningkatkan lembaga pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi yang berkualitas dan bermanfaat, berbasis kejuangan dan cinta tanah air.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan bidang usaha dan investasi yang sehat, wajar dan menguntungkan dalam sektor jasa, perdagangan, industri dan perkebunan.
- Menyalurkan bantuan pendidikan, keagamaan dan sosial kemanusiaan bagi Keluarga Besar Angkatan Darat khususnya dan masyarakat pada umumnya.



Tahun 1972, Jenderal TNI Umar Wirahadikusuma kala itu dalam kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) mendirikan sebuah Yayasan yang diberi nama "Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP)". Pendirian Yayasan Kartika Eka Paksi dikukuhkan melalui Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 10 Agustus 1972 yang dibuat oleh Notaris Abdul Latief, S.H. Yayasan Kartika Eka Paksi merupakan yayasan yang senantiasa bersemangat dalam bekerja, memegang teguh kejujurandalam usaha, berusaha mencapai kemakmuran guna meningkatkan kesejahteraan Keluarga Besar Angkatan Darat (KBAD) dan memiliki daya tahan menghadapi segala tantangan dalam rangka mendukung keberhasilan tugas dan tercapainya cita – cita mulia TNI-AD yaitu keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan sejati.



Di dalam mewujudkan visi dan misi di atas Yayasan Kartika Eka Paksi terus berupaya memberikan kontribusi untuk kesejahteraan Keluarga Besar Angkatan Darat (KBAD). Implementasi kinerja Yayasan Kartika Eka Paksi dalam mewujudkan visi dan misinya dimanifestasikan melalui program dan rencana aksi yang berfokus untuk perbantuan kesejahteraan Keluarga Besar Angkatan Darat. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan terkait antara lain bidang sosial (sosial pendidikan dan sosial ekonomi), bidang kemanusiaan dan bidang keagamaan.



Pemberian santunan bagi ahli waris prajurit yang gugur

Bidang Sosial:

Yayasan Kartika Eka Paksi telah memberikan bantuan berupa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) kepada Keluarga Besar TNI AD yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi dan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebesar 20% dari biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, Yayasan Kartika Eka Paksi telah memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebanyak 4.375 mahasiswa terdiri dari:

- Keluarga Besar Angkatan Darat: 3.867 mahasiswa
- Keluarga Besar Unjani: 508 mahasiswa

Yayasan Kartika Eka Paksi juga memberikan bantuan kepada prajurit TNI AD yang sedang menempuh pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan, sebanyak 13.162 prajurit terdiri dari:

- Bintara : 9.070 prajurit
- Pama : 3.372 prajurit
- Pamen/Pati : 720 prajurit

Bidang Sosial Ekonomi:

Pada tahun anggaran 2024 Yayasan Kartika Eka Paksi memberikan bantuan dana operasional bagi prajurit yang sedang melaksanakan operasi di perbatasan, sebesar Rp. 6.443.000.000 untuk 12.886 prajurit dan memberikan bantuan untuk satuan – satuan baru di jajaran TNI AD berupa Dana Tanggap satuan (DTS). Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Yayasan Kartika Eka Paksi telah menyalurkan bantuan DTS kepada 44 satuan baru dan terluar di jajaran lingkungan TNI-AD sebesar Rp. 4.450.000.000 serta dan bantuan kendaraan dinas kepada TNI-AD sebanyak 20 unit kendaraan dan bantuan rehab Koramil sebanyak 75 Koramil dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000 pada tahun anggaran 2024.

Bidang Keagamaan:

Yayasan Kartika Eka Paksi menyelenggarakan kegiatan ibadah umroh, ziarah rokhani dan ibadah tirtahyatra bagi, disisi lain Yayasan Kartika Eka Paksi juga mengadakan acara buka bersama dengan anak yatim piatu, memberikan bantuan hewan qurban kepada Keluarga Besar Angkatan Darat dalam pelaksanaan hari raya idul adha serta bantuan sarana dan prasarana ibadah khususnya yang berada di lingkungan/asrama TNI AD.

Bidang Kemanusiaan:

Yayasan Kartika Eka Paksi memberikan bantuan bagi ahli waris prajurit TNI AD yang gugur dalam operasi. Pada tahun anggaran 2024 Yayasan Kartika Eka Paksi telah menyalurkan Rp. 200.000.000 kepada 10 ahli waris prajurit yang gugur.

Sepanjang perjalanan sejarahnya hingga saat ini, Yayasan Kartika Eka Paksi Juga telah memberikan kontribusi sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. Kontribusi itu diwujudkan dalam bentuk partisipasi di berbagai bidang, baik bidang sosial melalui berbagai bantuan sosial maupun penyelenggaraan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan KBAD dan masyarakat umum, di bidang keagamaan melalui bantuan keagamaan, dan di bidang kemanusiaan melalui berbagai bantuan korban bencana alam maupun bantuan kemanusiaan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan yayasan.



Pemberian bantuan dana pendidikan kepada prajurit TNI AD



Pemberian bantuan DTS bagi satuan – satuan TNI AD



Pemberian bantuan kendaraan dinas operasional TNI AD



Buka bersama anak yatim



Pembangunan sarana dan prasarana ibadah



Pemberian Hewan Qurban



Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP)

Yayasan Kartika Eka Paksi mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Saat ini Yayasan Kartika Eka Paksi memiliki:

Dua lembaga pendidikan

1. Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi
2. Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

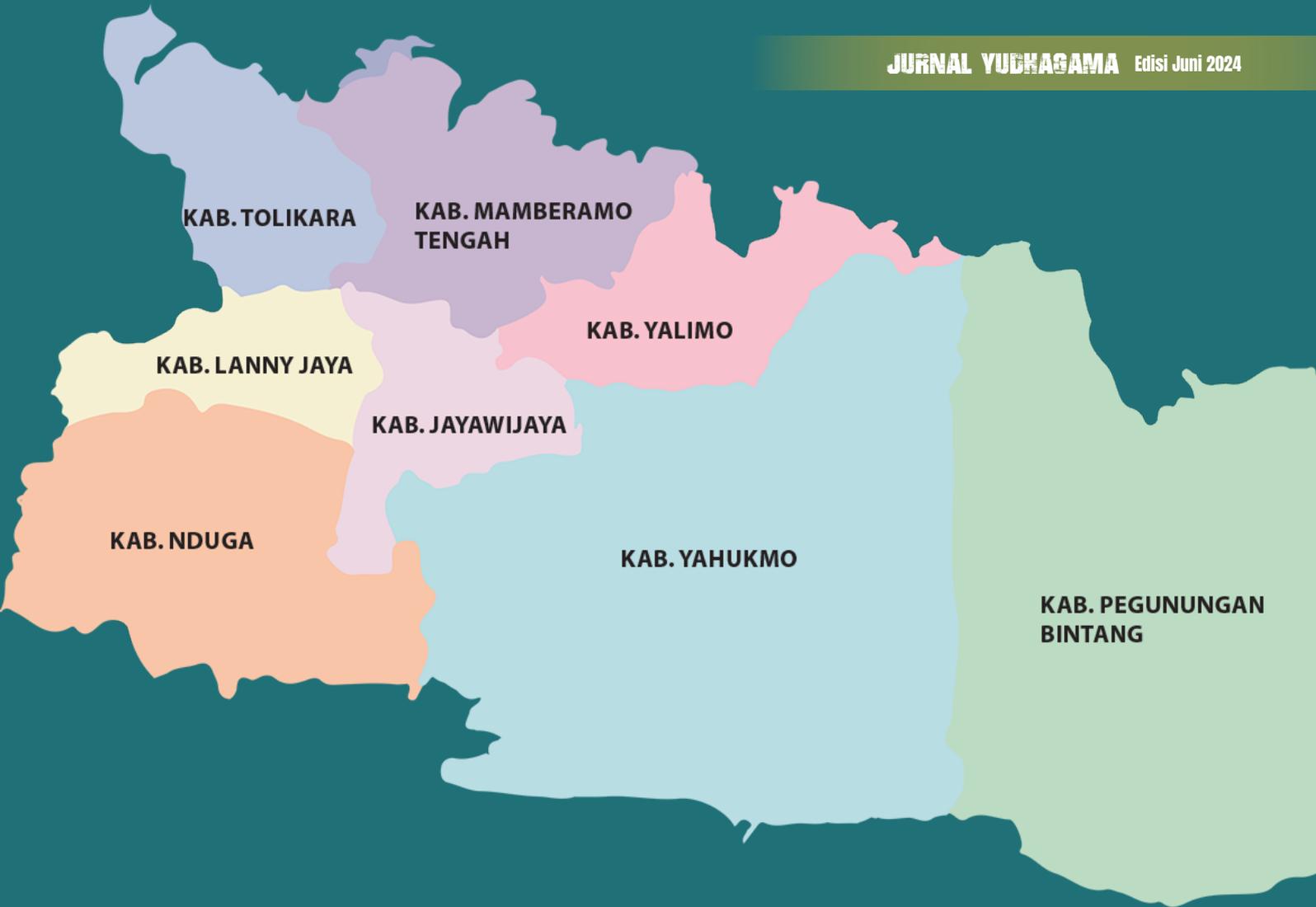
Sepuluh Badan Usaha Milik Yayasan (BUMY)

1. PT. Tri Usaha Bhakti
2. PT. Wahana Bhakti Utama
3. PT. Sahara Multi Hijau
4. PT. Nirmala Anugerah Sejahtera
5. PT. Graha Kartika Anugerah
6. PT. Cakrawala Bangun Persada
7. PT. Safira
8. PT. Marabunta
9. PT. Bhakti Wira Husada
10. Graha Kartika Sriwijaya

Yayasan Kartika Eka Paksi Juga bekerja sama dengan 9 Mitra Usaha, antara lain:

1. PT. Indotruba Tengah
2. PT. Indotruba Timur
3. PT. Sumbermas Indah Plywood
4. PT. Buanagraha Arthaprima
5. PT. Karisma Arya Paksi
6. PT. Kartika Airlines
7. PT. Putra Duta Indah Wood
8. PT. Simar Mitra Kartika
9. PT. Kartika Palembang Koneksi

Demikian tentang Yayasan Kartika Eka Paksi untuk Kesejahteraan Keluarga Besar TNI Angkatan Darat.



PENYELESAIAN KONFLIK DI **KABUPATEN NDUGA** PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DENGAN PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL



Oleh: Letkol Inf Hulisda Melala, S.E., M.I.P.
(Dandim 1706/Nduga)



Persiapan salah satu kelompok dalam rangka perang suku

Dalam konteks konflik dan pembangunan, Kabupaten Nduga saat ini menjadi sorotan nasional. Pada konteks konflik, Kabupaten Nduga kian memanas sampai saat ini. Berbagai upaya penanganan dan pendekatan sudah dilakukan, tetapi cenderung masih dominan dengan pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Pada konteks pembangunan, Kabupaten Nduga masih menjadi salah satu wilayah pembangunan nasional. Ditandai dengan dibukanya jalan Trans Papua yang pernah dilalui presiden RI Joko Widodo beberapa tahun lalu. Walaupun pembangunan kian gencar dilaksanakan oleh Pemerintah, namun faktanya konflik kekerasan di Kabupaten Nduga masih terus terjadi.

Kabupaten Nduga adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Kabupaten berada di Distrik Kenyam dan merupakan salah satu daerah sentral konflik antara kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan proses prioritas percepatan pembangunan di Papua yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah

Dalam klasifikasi konflik dan kekerasan di Nduga, telah berlangsung mulai dari skala kecil yakni perang

antar suku, konflik kriminal hingga korban kekerasan OPM. Dilihat dari perkembangan korban konflik kekerasan, didominasi korban dari OPM, pihak TNI/Polri dan masyarakat sipil baik asli Papua maupun pendatang.

Berbagai rentetan peristiwa gangguan keamanan tersebut, mewariskan “trauma psikologis” bagi masyarakat Nduga maupun pihak keamanan yang kerap kali menjadi korban perlawanan OPM. Jika dikaitkan secara teori empiris maka Konflik Nduga mendekati “teori Spiral”. Kajian ilmiah dalam teori ini kemudian memunculkan hipotesa penyebab berlangsungnya konflik secara terus-menerus yaitu kebiasaan adat-istiadat, tuntutan balas dendam/aktualisasi diri, menjadi obyek konflik, kecemburuan kebijakan pemerintah, dan adanya perbedaan informasi (*asymetris information*).

Perkembangan Kabupaten Nduga saat ini, konflik kekerasan terus memanas. warga asli saling curiga dengan warga pendatang, TNI/POLRI dengan warga, warga dengan TNI/POLRI. Oleh karena itu, perlu upaya nyata dan berkelanjutan dari Pemerintah daerah maupun TNI/POLRI dalam rangka mendukung pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Nduga.

Permasalahan Penanganan Keamanan di Kabupaten Nduga

Sejak awal terbentuknya Kabupaten Nduga di tahun 2008, daerah ini tergolong wilayah yang relatif aman. Namun dalam penelusuran, Kabupaten Nduga pernah menjadi sorotan dunia internasional yang dikenal dengan peristiwa Mapenduma pada tahun 1996. Setelah itu, beberapa konflik lainnya pun kerap terjadi sampai dengan peristiwa penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrstens saat ini.

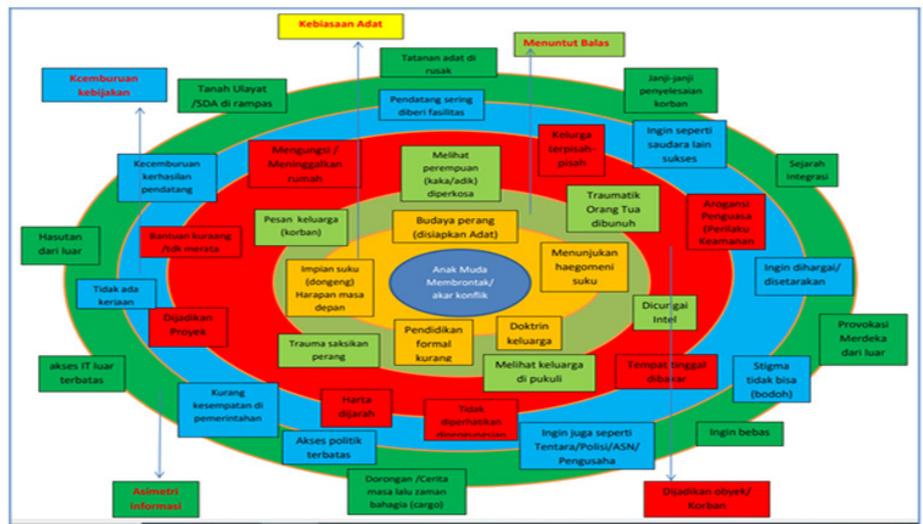
Dalam membedah persoalan keamanan di wilayah Kabupaten Nduga terbilang cukup kompleks. Hal ini disebabkan kondisi wilayahnya yang masih terbelakang. Bentang alamnya terdiri dari gunung, lembah dan dataran rendah serta rawa dan sungai, menjadikan wilayah ini strategis bagi OPM untuk berlindung dan melakukan konflik kekerasan. Sifat konflik dari daerah ini cukup kompleks, terutama menurut aktor/pelaku maupun wilayah. Dari aktor misalnya terjadi hal yang mengkhawatirkan, dimana dahulu dilakukan oleh oknum yang rata-rata berusia tua, seperti Kelly Kwalik, Daniel Yudhas Kogoya dan lain-lain.

Namun kali ini terjadi pergeseran dari yang tua ke yang usia muda, diantaranya Egianus Kogoya, Lekagak Telengen, Militer Murib dan lain-lain. Para diaspora di luar negeripun demikian. Dahulu dominan diperankan oleh oknum wilayah pantai, antara lain Markus Kaisiepo, Nicolas Jouwe, Nicholas Messet, dan Franszalbert Yoku. Kini mulai bergeser pula ke wilayah pegunungan, seperti Beny Wenda. Dari segi wilayahpun, juga bergeser. Tadinya dominan terjadi di wilayah pantai/pesisir seperti FakFak, Manokwari, Sorong, Biak, Serui dan Jayapura, kini merambah ke Pegunungan salah satunya di kabupaten Nduga.

Mencermati akseptasi konflik baik aktor maupun wilayah tersebut, maka diketengahkan teori spiral kekerasan

untuk mendiskripsikan penanganan konflik kekerasan di Papua, khususnya di wilayah Nduga. Teori ini dikemukakan oleh Dom Helder Camara, seorang tokoh dunia, lahir Februari 1909 di Fortalesa, Ceari, Brasil. Latar belakang teori ini adalah, sifat atau karakteristik konflik kekerasan di Papua, selalu berulang dan bergeser baik menurut aktor maupun wilayah, tetapi substansinya sama yakni menyerupai spiral. Sifat kekerasan menurut teori ini dimulai dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan, bersifat personal, institusional dan struktural, yaitu ketidak-adilan, kekerasan pemberontakan sipil dan represi negara.

Dalam pengamatan singkat di lapangan kondisi konflik Nduga menurut teori/pendekatan ini, mengambil kasus/pertanyaan “mengapa anak muda yang memberontak?”, ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar. Konflik Nduga dilihat dari Teori Spiral

Berdasarkan gambar lapisan lingkaran Teori Spiral diatas, maka dapat dikemukakan penyebab utamanya, yaitu :

1. Kebiasaan Adat ditandai dengan lingkaran kuning
2. Menuntut Balas/Aktualisasi Diri ditandai dengan lingkaran abu-abu
3. Dijadikan Objek ditandai dengan lingkaran merah
4. Merasakan Kecemburuan Kebijakan ditandai dengan lingkaran biru, dan
5. Asimetris informasi ditandai dengan lingkaran hijau.

Gagasan Pendekatan Penyelesaian Keamanan

Pendekatan keamanan yang dilakukan di Kabupaten Nduga perlu menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Nduga itu sendiri. Pendekatan-pendekatan tersebut sebagai berikut.

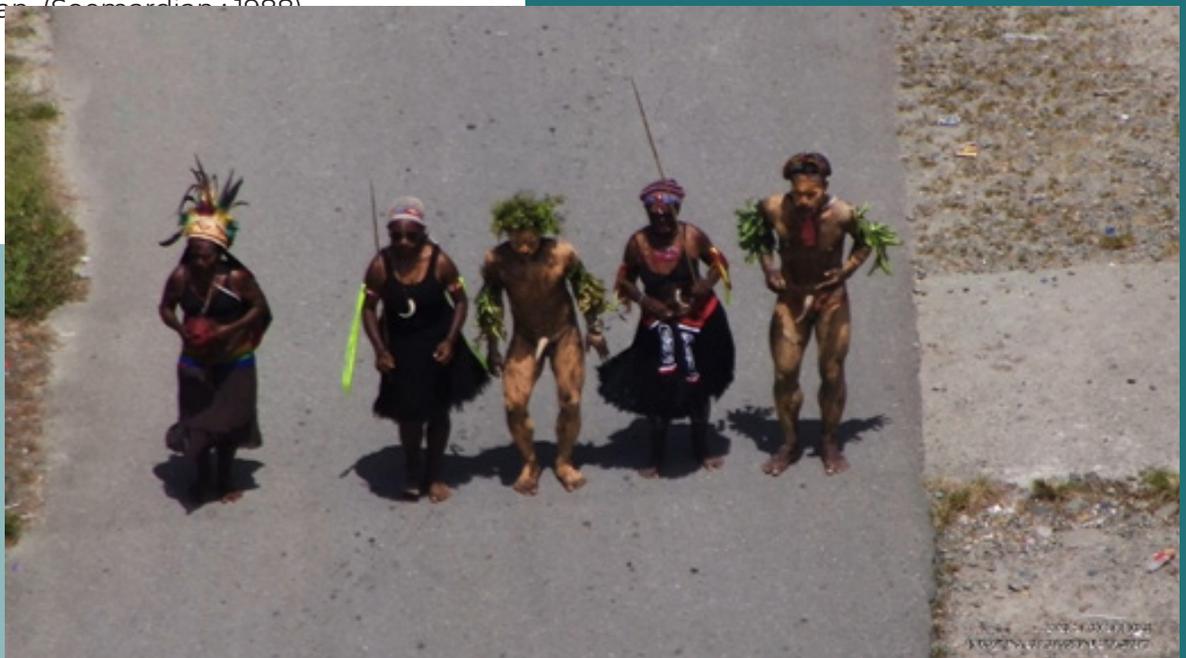
Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dapat digunakan dalam rangka memahami permasalahan keamanan di Kabupaten Nduga, maka kehidupan masyarakat Nduga tidak dilepaskan dengan struktur masyarakat. Sebagaimana pendapat Robert Taylor (1987), bahwa pada umumnya terdapat dua macam struktur sosial, yaitu:

- a. Struktur Horizontal. Berarti suku bangsa, kebudayaan dan keagamaan adalah sama dalam kedudukannya, sebagai warga negara.
- b. Struktur Vertikal. Struktur vertikal lebih sering digunakan istilah pelapisan sosial atau stratifikasi sosial yaitu penempatan setiap orang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan menduduki suatu kelas sosial yang sesuai dengan kapasitasnya. Dalam tradisi umum, sistem pelapisan sosial di dasarkan pada kualitas pribadi seperti jenis kelamin, senioritas dan keturunan (Soemardian, 1999).

Pendekatan Keluarga (Marga/ Klen/Fam/Keret)

Kelompok komunitas di Nduga memiliki ikatan dan jaringan sosial antara kelompok kekerabatan yang terbentuk dalam beberapa kelompok marga yang membawa beberapa implikasi terhadap kehidupan bermasyarakat bagi komunitas tersebut. Implikasi tersebut seperti aspek ekonomi, sosial, dan politik lokal bagi komunitas dalam lingkup masyarakat Nduga. Sehingga konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga lebih konstruktif di atasi dengan "Pendekatan Keluarga" mengerti latar belakang sosiokultur orang Nduga. Tidak juga dikesampingkan peran-peran eksternal pihak keamanan (TNI/POLRI) dalam mendukung penyelesaian konflik.



Tarian Suku Nduga Dalam Rangka Menyambut Tamu

Pendekatan Antropologis

Pada masyarakat Pegunungan Tengah memakai sistem kepemimpinan tradisional atau sistem kekuasaan lokal "Big Man" dalam bahasa lain disebut Manusia berwibawa, status tersebut diperoleh melalui perjuangan (*achived Status*) dengan cara perang bukan diturunkan (*ascribed status*), di suku Nduga mengenal tiga jenis pemimpin, (Mansoben : 1995) yaitu:

- Ap Nggok. Memiliki tugas sebagai pelindung masyarakat, menyatakan perang dan damai, bertanggung jawab membayar korban perang, berwenang menyatakan pembukaan kebun baru dan panen hasil kebun, menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat akibat pencurian, perzinahan dan pembunuhan.
- Kwal Ombo. Memiliki tugas memimpin upacara-upacara pe-nyembuhan, dapat mengusir roh-roh dan arwah nenek moyang, dan memimpin upacara yang berhubungan dengan siklus kehidupan warganya.
- Wim Wari. Memiliki tugas mengatur siasat dan strategi perang, memimpin perang, dan menjaga keamanan kampung dan lingkungan



Tradisi Bakar Batu Merupakan Implementasi Hubungan Kekerasan Yang Kuat Suku Nduga

Kultur perang suku di Nduga dilakukan dengan pola pendekatan represif militeristik oleh Negara, dalam hal ini TNI/POLRI tidak akan bisa dapat menyelesaikan persoalan. Dalam kultur perang suku di Nduga berlaku prinsip resiprositas dalam bentuk korban berimbang di kedua belah pihak, dimana pihak-pihak yang berperang tidak mau berdamai jika jumlah korban tidak berimbang. Di satu sisi keintiman hubungan kekerabatan diikat oleh pertalian biologis, geografis dan organisasi sosial sehingga apa bila dalam konflik (perang) dan ada korban maka melibatkan berbagai komponen dalam kelompok sosial serta memunculkan "Memoria Passionis" sehingga siklus kekerasan akan terus berlangsung di Nduga. Sehingga harus di dekati dengan budaya atau sistem kekerabatan kepemimpinan ditransformasi sistem kepemimpinan publik Ap Nggok (Bupati Kabupaten Nduga), Kwal Ombo (Tokoh Agama/Gereja dan Wim wari (Panglima perang suku Nduga).

Kebijakan Pembangunan

Terobosan berikutnya dalam penanggulangan kekerasan di Nduga atau wilayah konflik lainnya di Papua, juga bisa dilakukan dengan terus melakukan pembangunan dengan pendekatan sasaran yang tepat. Kabupaten Nduga tergolong wilayah yang dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrim di Papua, (Kemendes-RI : 2021) dengan angka 36,73% (2022). Angka Stunting 38,8 (2021), dan Gini Ratio sebesar 0,231 (2021). Dari data ini menunjukkan Nduga pada tataran pembangunan sangat bermasalah, apa lagi bila dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk OAP. Oleh karena itu program pemenuhan kebutuhan dasar, seperti penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan menjadi mutlak harus dilakukan.



Pendekatan Gereja Menjadi Salah Satu Pembawa Kedamaian di Masyarakat

Pendekatan Relokasi Pengungsi

Dalam periode konflik Nduga, pengungsi telah terjadi dalam 2 periode. yaitu terjadi pada tanggal 1 Desember 2018 pada saat terbunuhnya karyawan PT. Istaka Karya oleh OPM di Distrik Yigi dan pada tanggal 7 Februari 2023 yaitu peristiwa pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan pilot Philips Mark Marthens yang berdampak pada masyarakat di Distrik Paro dan Meborok (Yuguru) mengungsi. Dari 2 periode tersebut maka “Jumlah distrik yang telah ditinggalkan sebanyak 15 Distrik dari 32 Distrik yang ada di Kabupaten Nduga”

Relokasi pengungsi tidak hanya soal “Tempat Pengungsian dan Dana”, tapi juga harus menyentuh “perlakuan” dari pemerintah dan TNI/Polri. Para pengungsi Nduga, secara kekerabatan adalah bagian dari OPM, oleh karena itu perlu dijaga dan diperlakukan secara humanis dan layak agar pesan “Kebaikan dan Kasih” dapat tersampaikan kepada “OPM” sehingga diharapkan ada perubahan pola pikir (*Mindset*).

Pendekatan “Pindah Kamar” Generasi Muda Nduga

Pendekatan ini dimaksudkan untuk merubah pola hidup, cara berpikir hingga masa depan generasi muda Nduga, yang hari ini masih terpengaruh oleh pemikiran ideologi “merdeka atau pisah dari NKRI”. Pindah kamar adalah bukan saja dengan merangkul kembali generasi muda Nduga

dalam kelompok OPM untuk kembali ke pangkuan NKRI, tetapi juga ditujukan kepada generasi muda Nduga yang saat ini masih tersebar luas di seantero 32 Distrik untuk mendapatkan pengakuan, perlakuan, pembinaan dan pemberdayaan secara terintegrasi dan berkelanjutan serta terstandar pada sistem hukum Indonesia.

Konsep pindah kamar tersebut dapat dilakukan dengan upaya – upaya konkrit sebagai berikut :

- a. Melalui penerimaan CPNS.
- b. Penerimaan tenaga Satpol Pamong Praja sebagai wadah transit dalam pembinaan untuk dipersiapkan mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI/POLRI.
- c. Penempatan kaum muda menjadi anggota DPRK.
- d. Pembinaan pemuda menjadi pengusaha local.
- e. Pembinaan dan Pembekalan Keterampilan Kerja (BLK).
- f. Pengembangan wadah pembinaan olahraga (Nduga Sport Center) dan Seni Budaya.



Pengangkatan Pemuda Asli Papua Sebagai Anggota Satpol PP sebagai konsep Pindah Kamar

Pada prinsipnya konflik di Kabupaten Nduga tidak bisa dianggap permasalahan keamanan yang hanya ditangani oleh pihak TNI/POLRI saja, tetapi sudah saatnya dipikirkan untuk diredesain cara penanganan konflik Nduga yang lebih komprehensif yakni mengarah pada dampak jangka panjang yaitu berubahnya mindset kelompok-kelompok yang selama ini bertentangan dengan NKRI agar generasi setelahnya tidak lagi terkontaminasi untuk melakukan aksi-aksi serupa.

PERAN DENBEKANG V/1. B MADIUN DALAM MENDUKUNG TUGAS KOREM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH



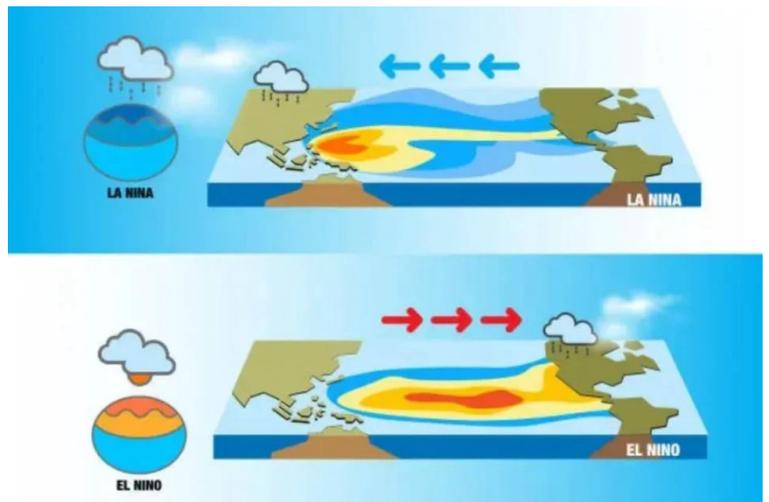
Oleh: Letkol Cba I Ketut Arsana Putra S.T., M.Sc
Dandenbekang V/1.B Madiun

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap terjadinya bencana, terutama karena letak wilayah negara Indonesia yang berada pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik utama dunia serta kondisi alamnya yang terdiri dari hutan, gunung-gunung terutama gunung berapi, aliran sungai dan rawa-rawa. Bencana alam yang akan terjadi pada dasarnya sulit diprediksi, walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dan maju secara pesat, namun belum mampu memprediksi dan memperkirakan kapan, di mana dan jenis bencana alam apa yang akan terjadi. Akibat kondisi tersebut maka setiap terjadinya bencana alam selalu menimbulkan korban jiwa, harta benda serta kerusakan daerah. Selain itu letak Indonesia yang berada di daerah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, menyebabkan gerakan-gerakan tanah pada tempat-tempat yang secara geologis memang labil menjadi lebih berpotensi terjadinya longsor. Keadaan ini diperparah lagi dengan maraknya penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya



Ilustrasi Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik (Foto: National Geographic)

serta banyaknya pembabatan hutan yang dilakukan secara ilegal, tanpa mengindahkan keseimbangan lingkungan, maka lengkplah Indonesia menjadi wilayah yang rawan bencana alam, baik gempa tektonik, tsunami, letusan vulkanik gunung berapi, banjir dan tanah longsor maupun kebakaran hutan.



El Nino dan La Nina

Posisi geografis dan struktur geologis Indonesia yang demikian itu, sangat diketahui oleh pemerintah dan para ahli geologi di negeri ini, namun masalah mendasar yang kita hadapi adalah belum adanya program jangka panjang dalam rangka upaya penanganan bencana alam secara dini. Kalaupun ada, belum menunjukkan grafik signifikan, belum ada teknologi yang lebih maju dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam. Sehingga kasus-kasus bencana alam yang terjadi saat ini tidak bisa ditangani secara optimal. Jumlah korban jiwa cukup tinggi, begitupun kerugian material sangat besar, seperti pada kasus bencana tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, membuktikan lemahnya pengetahuan masyarakat tentang bencana, sikap perilaku antisipasi dan upaya penanggulangan bencana alam tersebut.



Pengaruh La Nina dan El Nino



Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang merupakan komponen utama pertahanan di matra darat, sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok TNI baik dalam OMP maupun OMSP. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas tersebut sangat tergantung dengan kesiapan seluruh satuan yang dimiliki oleh TNI AD. Satuan TNI AD yang berupa gelar pasukan yang terdiri dari bala pertahanan pusat seperti Kostrad, Kopassus dan

struktur Komando Kewilayahan seperti Kodam, Korem, Kodim, Koramil yang tersebar diseluruh wilayah darat Indonesia. Seluruh komponen TNI AD tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk mendukung pencapaian tugas-tugas TNI dalam bidang pertahanan baik OMP maupun OMSP. Di masa mendatang tugas yang dihadapi akan semakin kompleks dan berat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kesiapan seluruh komponen yang ada dalam TNI AD untuk dapat menghadapi ancaman yang datang. Kemampuan TNI AD yang tangguh juga harus didukung oleh sistem dukungan logistik yang memadai serta dukungan angkutan militer untuk mobilitas pergeseran pasukan dan logistik dari daerah pangkalan menuju daerah operasi. Di dalam TNI AD badan yang bertugas menyelenggarakan pembekalan angkutan militer adalah Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat (Pusbekangad).



Dukungan Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat (Pusbekangad) sangat penting untuk menopang OMP maupun OMSP yang dilakukan oleh TNI AD. Kemampuan OMP maupun OMSP ditentukan oleh seluruh pasukan beserta perlengkapannya. Daya tahan atau daya juang operasi yang dilakukan oleh pasukan di lapangan sangat ditentukan oleh sistem daya dukung logistik yang memadai pula, yang dalam hal ini dilakukan oleh Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat. Dalam mewujudkan kesiapan satuan-satuan tugas pasukan TNI AD yang salah satunya tercakup dalam Struktur Komando Kewilayahan seperti Kodam, Korem, Kodim, Koramil, perlu kiranya mengetahui peran Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat (Pusbekangad) dalam menyelenggarakan pembekalan, dan dukungan jasa Bekang (jasa intendan dan angkutan) secara efektif dan efisien sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan organisasi, baik OMP untuk menghadapi ancaman agresi militer maupun OMSP seperti penanggulangan tanggap darurat bencana alam.

Sebuah negara yang tidak memiliki sistem dukungan logistik, akan mudah mengalami kekalahan dalam suatu peperangan. Begitu pula untuk OMSP salah satunya penanggulangan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi keberadaan satuan Bekang sangat strategis, baik dalam rangka proses evakuasi korban bencana

menuju daerah aman ke daerah pengungsian maupun pendirian posko-posko logistik lapangan. Hal ini dapat dilihat dalam keterlibatan operasi kemanusiaan peran TNI AD khususnya satuan Pembekalan Angkutan yang menjadi salah satu komponen utama dalam proses penanggulangan dan evakuasi korban bencana. Detasemen Pembekalan Angkutan (Denbekang) merupakan Dinas Pembekalan Angkutan di bawah Pembekalan Angkutan Komando Utama (Bekang Kotama/Kodam) yang melayani dan menyelenggarakan pembekalan angkutan TNI AD di Komando Kewilayahan tingkat Komando Resort Militer (Korem).

Denbekang menyelenggarakan serta melayani pembekalan, dukungan jasa, dan pemeliharaan materiel Bekang, untuk seluruh satuan militer yang berada di jajaran Korem. Keberhasilan pelaksanaan peran Denbekang dalam menyelenggarakan serta melayani proses pembekalan angkutan terhadap seluruh satuan di jajaran Korem juga ditentukan oleh keberhasilan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peran tersebut di lapangan. Tulisan di bawah ini akan mengupas "Peran Denbekang V/1.B Madiun dalam mendukung tugas Korem dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Implementasi dukungan Denbekang V/1.B Madiun dalam mendukung tugas tersebut adalah melalui pembekalan, dukungan jasa (Intendans dan angkutan). Denbekang Madiun penyelenggaraan proses pembekalan angkutan bagi satuan-satuan TNI AD di jajaran Korem 081/Dsj Madiun untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Korem. Peran Denbekang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi ketahanan suatu wilayah terutama aspek pertahanan dan keamanan. Detasemen Pembekalan Angkutan V/1.B Madiun berperan menyelenggarakan fungsi Bekang bagi seluruh satuan yang berada di bawah Korem 081/Dsj Madiun. Dengan demikian peran Denbekang V/1.B Madiun dalam menyelenggarakan dukungan pembekalan angkutan turut mempengaruhi dan meningkatkan ketahanan wilayah.

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Korem Madiun

Kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Korem 081/Dsj Madiun dalam rangka membina seluruh potensi wilayah yang tercakup ke dalam 8 (delapan) gatra kehidupan nasional agar dapat menjadi suatu komponen pertahanan negara yang tangguh harus dapat dilaksanakan dengan maksimal. Perkembangan dan perubahan situasi dunia saat ini, di mana isu globalisasi dan lingkungan hidup yang dihembuskan negara maju merupakan upaya intervensi terhadap negara berkembang yang mengarah terjadinya kompetisi antar bangsa baik dalam lingkup global maupun regional. Implikasi dari perkembangan tersebut memunculkan kerawanan dibidang keamanan. Bila dihadapkan dengan letak geografis wilayah Indonesia dan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (ipoleksusbudhankam) negara Indonesia, maka hal tersebut dapat berkembang menjadi ancaman bagi keamanan dan keutuhan wilayah negara Indonesia.



Menghadapi tantangan tugas tersebut Korem 081/Dsj Madiun yang merupakan salah satu Komando Kewilayahan di Provinsi Jawa Timur bagian barat dan setengan bagian selatan, harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Sistem pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem pertahanan semesta (Sishanta), sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan penyelenggaraan pertahanan

dilaksanakan dengan sistem pertahanan yang bersifat semesta (Sishanta), yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara. Komando Resort Militer (Korem) 081/Dsj Madiun di dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan guna membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional guna kepentingan pertahanan negara sudah berjalan, namun bila dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini perlu adanya suatu peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan lebih mengoptimalkan aspek asta gatra kehidupan nasional yaitu geografi, demografi, sumber daya alam, dan kondisi sosial agar menjadi kekuatan pertahanan serta pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya buatan menjadi kemampuan cadangan dan pendukung guna terwujudnya kekuatan wilayah pertahanan yang kokoh khususnya wilayah Korem 081/Dsj Madiun.

Pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Korem 081/Dsj Madiun sebagai satuan Komando Kewilayahan dalam rangka membina potensi wilayah yang meliputi potensi delapan aspek asta gatra yaitu geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam harus dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Agar semua potensi wilayah dapat dibina dengan baik maka Korem 081/Dsj Madiun sebagai sebuah Komando Kewilayahan harus dapat melaksanakan pembinaan secara maksimal, diharapkan pembinaan potensi wilayah pertahanan terus ditingkatkan melalui kegiatan komunikasi sosial (Komsos) dan bhakti TNI AD dalam hal ini dilakukan oleh Korem 081/Dsj sehingga wilayah tersebut dapat dijadikan wilayah pertahanan untuk kebutuhan pertahanan negara. Denbekang V/1.B Madiun sebagai badan logistik Korem 081/Dsj Madiun memiliki peranan yang penting dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan komunikasi sosial dan operasi bhakti TNI AD berupa Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) tersebut.

Pergeseran pasukan dari satu wilayah ke wilayah lain sangat membutuhkan angkutan serta penyediaan logistik lapangan bagi prajurit yang sedang melaksanakan tugas komunikasi sosial maupun operasi bhakti TNI-AD. Peran Denbekang V/1.B Madiun sangat dibutuhkan karena merupakan badan yang menyelenggarakan pembekalan angkutan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Korem 081/Dsj Madiun. Kondisi geografis wilayah Madiun sekitarnya merupakan daerah yang rawan bencana alam terutama banjir tahunan dan tanah longsor. Peranan Denbekang sebagai unsur penyelenggara pembekalan angkutan Korem 081/Dsj Madiun sangat penting. Daerah Keresidenan Madiun merupakan wilayah rawan bencana yaitu bencana banjir tahunan dan tanah longsor. Bencana banjir disebabkan karena wilayah Keresidenan Madiun dilewati oleh Sungai Bengawan Solo di Ngawi dan Bengawan Madiun di Kabupaten dan Kota Madiun yang merupakan anak Bengawan Solo tiap tahun menyebabkan banjir. Begitu pula bencana tanah longsor dan banjir yang sering melanda Kabupaten Pacitan yang secara topografi memang rentan bencana alam. Denbekang V/1.B Madiun sebagai satuan pembekalan angkutan berperan dalam mendirikan dapur lapangan di daerah bencana dan bantuan LCR untuk mengevakuasi, memantau daerah bencana. Korem mendirikan dapur lapangan sehingga Korem memerlukan dukungan Denbekang sebagai badan logistik untuk mendirikan dapur lapangan untuk membantu masyarakat yang dilanda bencana.

Dengan demikian kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan dilakukan melalui Bhakti TNI AD pasca bencana. Selain melalui penyelenggaraan bhakti TNI AD, adapun pembinaan potensi wilayah pertahanan adalah membina masyarakat agar menjadi komponen cadangan dan pendukung yang siap dimobilisasi guna kepentingan pertahanan negara yaitu dengan



meningkatkan pembinaan komunikasi sosial dengan masyarakat sehingga timbul kesadaran masyarakat dalam meningkatkan belanegara. Kondisi geografis wilayah Korem 081/Dsj Madiun yang luas serta sebagian masih terpencil memerlukan personil dengan mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang cepat dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok memerlukan sarana angkutan dalam hal ini kendaraan. Setiap kendaraan memerlukan bahan bakar sebagai sumber energi untuk bergerak. Denbekang V/1.B Madiun yang memiliki peran menyelenggarakan pembekalan angkutan sangat mendukung mobilitas Korem 081/Dsj Madiun melalui dukungan logistik berupa bahan bakar untuk sarana transportasi satuan dan prajurit. Korem 081/Dsj sebagai satuan teritorial harus mampu menjangkau seluruh wilayah yang menjadi tanggungjawab Korem 081/Dsj Madiun, sampai daerah terpencil. Keberadaan Koramil dengan Bintara Pembina Desa atau Babinsa merupakan ujung tombak pimpinan dalam memantau wilayah serta untuk melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat. Untuk dapat mencapai semua itu, perlu dukungan bahan bakar sebagai penopang kegiatan satuan serta personil. Dukungan Denbekang V/1.B Madiun sebagai badan logistik Korem, sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas melalui dukungan bahan bakar minyak kepada Korem 081/Dsj Madiun beserta jajarannya. Ketahanan wilayah matra darat khususnya wilayah Korem 081/Dsj Madiun sebagai

bagian dari ketahanan bidang pertahanan merupakan kondisi dinamik suatu wilayah yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan wilayah darat dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan melalui darat baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kedaulatan di wilayah darat.

Kegiatan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Korem 081/Dsj Madiun sebagai salah satu bagian Komando Kewilayahan Kodam V/ Brawijaya di Provinsi Jawa Timur bagian barat dan setengah bagian selatan menjadi penting dan strategis guna mewujudkan ketahanan wilayah matra darat yang tangguh. Peran Denbekang V/1.B Madiun dalam rangka menyiapkan kebutuhan bekal beserta pendistribusiannya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan wilayah pertahanan di jajaran Korem 081/Dsj Madiun telah memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan ketahanan wilayah darat. Pentingnya peran yang dihadapi oleh Denbekang V/1.B Madiun dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Korem 081/Dsj Madiun, di mana Korem 081/Dsj Madiun sebagai salah satu kekuatan pertahanan Komando Kewilayahan dan bertugas menghimpun segala potensi wilayah yang dapat mendukung pertahanan negara yang kemudian dihadapkan dengan ancaman yang semakin kompleks ke depan, menuntut kesiapan Denbekang V/1.B Madiun menghadapi tugas-tugas tersebut.



Implikasi Perberdayaan Wilayah Pertahanan Terhadap Ketahanan Wilayah

Untuk mengetahui sejauh mana implikasi peran Denbekang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Korem 081/Dsj Madiun terhadap ketahanan wilayah, barometernya adalah berdasarkan konsepsi ketahanan nasional. Kondisi ketahanan wilayah di daerah merupakan wujud dari ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional yang terdiri dari 8 gatra atau astagatra di mana 3 gatra merupakan aspek alamiah sedangkan 5 gatra lainnya adalah aspek sosial. Dengan demikian yang menjadi ukuran peran Denbekang V/1.B Madiun dalam mendukung tugas pokok Korem 081/Dsj Madiun terhadap ketahanan wilayah adalah mengacu pada lima aspek sosial yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan/keamanan.

Bidang Ideologi

Geografis Provinsi Jawa Timur bagian barat dan sebagian sebelah selatan yang merupakan wilayah teritorial Korem 081/Dsj Madiun, dengan berbagai macam wilayah topografi yang masih banyak terisolasi menjadikan wilayah yang rentan dimasuki sebuah ideologi baru bagi masyarakat. Kondisi Topografi yang homogen seperti kesamaan suku, adat, budaya, agama di dalamnya membentuk masyarakat yang dinamis dalam bingkai nilai-nilai Pancasila seperti saling

menghormati, toleransi dan kerukunan hidup bersama. Era globalisasi di mana batas-batas antar negara cenderung tidak ada jarak mengakibatkan bergesernya pola hidup dan mata pencaharian warga di wilayah yang terpencil dan tertinggal. Masalah perekonomian yang sulit dan diikuti oleh terbatasnya lapangan pekerjaan dapat membuat konsep berbangsa menjadi berubah. Pengaruh dari luar baik melalui media informasi maupun sosial antar warga tersebut, dapat membuat nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh menjadi luntur. Oleh karena itu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan memberantas kemiskinan melalui pembangunan daerah tertinggal untuk mencegah masyarakat tidak mudah terpengaruh karena masalah ekonomi yang mengakibatkan berubahnya pandangan ideologis sebagai pelarian akibat kemiskinan. Dengan memantapkan kondisi mental bangsa Indonesia khususnya wilayah Korem 081/Dsj Madiun berdasarkan Pancasila dengan komunikasi sosial sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk menangkali pengaruh ideologi lain yang dapat berpengaruh kepada keutuhan wilayah.

Wilayah eks Keresidenan Madiun yang menjadi perhatian penting pemerintah adalah adanya indikasi berkembangnya aliran radikal mengarah ke terorisme yang mengatasnamakan agama. Akhir-akhir ini isu terorisme begitu mengancam keamanan nasional bangsa. Peran Korem 081/Dsj beserta seluruh jajarannya termasuk Denbentang V/1.B Madiun yang memberikan dukungan pembekalan angkutan dalam menjalankan tugas teritorial sangat membantu mengurangi dampak bergesernya cara pandang mereka terhadap masuknya konsep ideologi asing mengarah ke terorisme, karena merasa diperhatikan oleh pemerintah melalui TNI AD dalam hal ini seluruh jajaran Korem 081/Dsj Madiun yang sedang melaksanakan tugas kemanusiaan dan siaga bencana. Hal ini akan dapat menjaga ketahanan wilayah bidang ideologi. Dengan memantapkan kondisi mental masyarakat yang berdasarkan Pancasila melalui komunikasi sosial yang dilakukan oleh aparat TNI AD akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menangkali

pengaruh ideologi lain yang dapat mempengaruhi keutuhan bangsa dan negara.

Bidang Politik

Perubahan sistem politik Indonesia dengan konsep otonomi daerah membawa konsekuensi pada penguatan demokrasi ditingkat lokal, yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat diberikan kesempatan untuk menggunakan kecerdasannya, kearifannya, dan kepeduliannya dalam menentukan dan memilih secara langsung siapa yang dianggap layak dan pantas menjadi pemimpinnya. Dengan adanya otonomi, daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini mendorong daerah untuk berlomba-lomba mengajukan pemekaran daerah dan terpisah dari induknya. Perkembangan keadaan ini bisa menjadi ketidakstabilan politik di suatu daerah. Ketidakstabilan politik rawan adanya kerusuhan sosial dan terganggunya stabilitas keamanan wilayah. Perwujudan ketahanan aspek politik memerlukan kehidupan politik bangsa yang sehat, dinamis, dan mampu memelihara stabilitas keamanan wilayah. Pembinaan dibidang politik diharapkan dapat mengajak masyarakat agar melaksanakan kegiatan politik secara sehat guna kepentingan bangsa dan negara.

Untuk wilayah eks Keresidenan Madiun yang merupakan teritorial Korem 081/Dsj, di mana secara tradisional terdiri dari masyarakat yang secara politik disebut wilayah Mataraman. Wilayah Mataraman merupakan wilayah bagian barat Jawa Timur yang didominasi budaya Jawa yang masih berkiblat budaya keraton. Biasanya daerah Mataraman merupakan masyarakat agamis yang masih memegang teguh tradisi budaya sehingga disebut kaum santri abangan. Daerah eks Keresidenan Madiun secara tradisional adalah wilayah basis kaum Nahdliyin (NU) dan basis masyarakat yang beraliran nasionalis agamis. Ini terbukti dari hasil pemilu selama ini, di mana partai pemenang pemilu di wilayah Madiun sekitarnya adalah selalu partai berbasis nasionalis agamis. Tugas seluruh satuan di jajaran Korem

081/Dsj Madiun termasuk Denbekang V/1.B Madiun yang menyelenggarakan dukungan pembekalan angkutan dalam membantu mengamankan wilayah di Madiun dan sekitarnya turut membantu dalam menjaga stabilitas keamanan dibidang politik. Dengan pendekatan teritorialnya yang mampu menjangkau wilayah terpencil, dengan menempatkan personilnya sebagai satuan tugas pengamanan daerah rawan konflik yang terpencil, sehingga dapat menjaga ketahanan wilayah bidang politik. Pembinaan teritorial yang dilakukan selama ini oleh TNI AD diharapkan dapat mengajak masyarakat agar melaksanakan kegiatan politik secara sehat guna kepentingan pembangunan demokrasi bangsa.

Bidang Ekonomi

Perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi, dan jasa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan alat serta berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi yang berdaya saing tinggi serta mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Salah satu hambatan dalam bidang ketahanan ekonomi adalah masalah stabilitas sosial masyarakat yaitu yang paling penting stabilitas keamanan wilayah. Kondisi stabilitas sosial wilayah yang tidak dinamis akan mempengaruhi sistem perekonomian secara keseluruhan.

Salah satu isu penting yang berhubungan dengan stabilitas sosial

yang meliputi stabilitas keamanan masyarakat adalah keberadaan wilayah Madiun yang terkenal dengan sebutan kota pendekar. Memang diketahui wilayah Madiun merupakan wilayah tempat awal berdirinya beberapa perguruan silat besar yang berkembang secara nasional. Hal ini menyebabkan wilayah Madiun bisa menjadi sorotan regional bahkan nasional seakan-akan wilayah Madiun dan sekitarnya merupakan daerah yang rawan bentrokan dan kerusuhan akibat adanya perguruan silat besar yang berpusat di Madiun. Dengan wilayah yang rawan bentrokan seperti tersebut di atas, perekonomian masyarakat akan terganggu karena tidak terjaminnya stabilitas keamanan sosial masyarakat. Memang diakui beberapa tahun yang lalu sering terjadi bentrokan antar perguruan besar silat tersebut, tapi saat ini sudah bisa diredam dengan pendekatan ke pihak terkait. Kondisi perekonomian di wilayah Madiun berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan dan hambatan. Semua itu terwujud karena didukung oleh stabilitas sosial masyarakat yang relatif kondusif sehingga memberi dampak yang baik bagi perkembangan perekonomian masyarakat dan kemajuan wilayah. Terciptanya stabilitas keamanan sosial masyarakat, tidak terlepas dari peran Korem 081/Dsj beserta seluruh jajarannya termasuk Denbekang V/1.B Madiun Madiun memberikan dukungan pembekalan angkutan guna menjalankan tugas pokok seluruh satuan. Dengan berjalan maksimalnya peran aparat intelejen militer dalam membantu Polri menjaga stabilitas keamanan masyarakat maka diharapkan isu terorisme dapat dicegah sedini mungkin sehingga akan menjaga Ketahanan Wilayah bidang ekonomi. Intinya adalah pertahanan dalam hal ini seluruh jajaran Korem 081/Dsj hadir di tengah masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga pertahanan hadir untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan wilayah yang dilakukan personil Korem Madiun dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan perekonomian secara mandiri dan dapat mengatasi gejolak sosial ekonomi akibat keterpurukan ekonomi seperti program ketahanan pangan, pompanisasi,



manunggal air bersatu dengan alam yang bertujuan untuk membantu keberhasilan para petani dan mencegah gagal panen.

Bidang Sosial Budaya

Era globalisasi yang saat ini terjadi membawa dampak sosial yang cukup besar. Budaya asing yang dulu masih tabu kini menjadi bagian sebagian masyarakat kita seperti budaya hidup bebas, konsumerisme, penggunaan narkoba dan yang terbaru maraknya judi online di masyarakat. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Indonesia adalah kehidupan masyarakat yang menyangkut aspek kemasyarakatan dan kebudayaan yang dijiwai oleh falsafah bangsa yaitu Pancasila. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Indonesia dengan demikian adalah pengembangan kondisi sosial budaya sehingga setiap masyarakat dapat merealisasikan pribadi segenap potensi manusiawinya dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang akan diwujudkan sebagai ukuran tuntunan sikap dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia, akan memberi

landasan, semangat, dan jiwa yang secara khas mewujudkan diri pada elemen-elemen sosial budaya bangsa dan negara Indonesia.

Untuk mencapai semua tujuan tersebut yaitu ketahanan sosial budaya nasional khususnya di wilayah eks Keresidenan Madiun agar tetap terjaga dan stabil, juga harus didukung oleh stabilitas sosial masyarakat yang dinamis di daerah sehingga terwujudnya ketahanan wilayah yang kokoh. Kondisi sosial yang tidak stabil dalam masyarakat khususnya di wilayah teritorial Korem 081/Dsj Madiun akan berdampak negatif bagi perkembangan sosial budaya nasional. Selain pengaruh globalisasi, peristiwa terjadinya bencana alam bisa menyebabkan kondisi sosial yang tidak stabil apabila bencana alam tersebut terlambat dalam penanganannya. Oleh karena itu peran TNI AD dalam hal ini seluruh satuan militer di jajaran Korem 081/Dsj Madiun harus dapat menjaga stabilitas sosial budaya baik karena dampak globalisasi maupun bencana alam. Ketahanan wilayah bidang sosial dapat dijaga dengan meningkatkan kemampuan mobilitas satuan sehingga cepat bergerak ke tempat yang membutuhkan. Denbekang V/1.B Madiun berperan menyiapkan dukungan pembekalan angkutan yaitu bahan bakar dan angkutan untuk mendukung mobilitas satuan yang membutuhkan. Dengan

demikian ketahanan wilayah bidang sosial budaya dapat dijaga dan ditingkatkan. Kegiatan pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan komunikasi sosial telah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menangkal masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Bidang Hankam

Pertahanan dan keamanan Bangsa Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi bangsa termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dan Bangsa Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran membela negara seluruh rakyat. Kondisi ini mengandung kemampuan bangsa dalam memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta mempersatukan kedaulatan negara dan masyarakat dari segala ancaman dan gangguan. Melalui pelaksanaan Bhakti TNI AD dan komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh Korem 081/Dsj Madiun beserta jajarannya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran bela negara untuk meningkatkan perlawanan rakyat terhadap setiap ancaman yang dapat membahayakan stabilitas wilayah.

Keamanan wilayah Korem 081/Dsj Madiun menjadi tanggungjawab seluruh satuan militer di jajaran Korem 081/Dsj Madiun sebagai komponen utama pertahanan dan keamanan matra darat. Apalagi di daerah Korem 081/Dsj Madiun yaitu di Maospati Magetan

terdapat pangkalan TNI AU Iswayudi yang merupakan pangkalan terbesar TNI AU di wilayah Timur Indonesia. Sebuah pangkalan militer tentu memiliki peralatan utama sistem senjata yang canggih dan berharga mahal seperti pesawat tempur, peluru kendali, radar, dan lain sebagainya. Ini memerlukan suatu kondisi dan kerjasama yang baik dalam menjaga stabilitas wilayah darat sekitar pangkalan TNI AU demi menjaga keamanan peralatan tersebut. Sebagai tulang punggung kekuatan matra darat di eks keresidenan Madiun, Korem 081/Dsj harus menyiapkan seluruh satuan militer sebaik mungkin dalam mendukung stabilitas keamanan wilayah. Detasemen Pembekalan Angkutan V/1.B berperan dalam menyiapkan kebutuhan perbekalan angkutan. Kesiapan ini perlu agar seluruh satuan militer tersebut tidak mengalami kendala yang berarti saat menjalankan kegiatan-kegiatan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian ketahanan wilayah bidang pertahanan dan keamanan dapat dijaga dan ditingkatkan. Seluruh satuan di jajaran Korem 081/Dsj Madiun merupakan bagian dari unsur-unsur TNI AD khususnya Kodam V/Brawijaya yang menjaga dan meningkatkan aspek pertahanan pada wilayah di eks Keresidenan Madiun melalui kegiatan intelijen, operasi, pembinaan personil, penyelenggaraan logistik serta pelaksanaan teritorial yang semua tugas tersebut membutuhkan dukungan perbekalan angkutan. Dengan demikian peran dukungan pembekalan angkutan Denbakang V/1.B Madiun berperan dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan wilayah. Pelaksanaan tugas bhakti TNI dan komunikasi sosial oleh TNI dapat meningkatkan kesadaran belanegara untuk meningkatkan perlawanan rakyat terhadap setiap ancaman yang dapat membahayakan keutuhan negara kita.



PENGABDIAN KODIM 1206/PUTUSSIBAU

DALAM MENGATASI KRISIS AIR BERSIH DI WILAYAH PERBATASAN

Oleh: Letkol Inf Nasli S. Sos.
(Dandim 1206/Putussibau)

Dunia baru saja memperingati Hari Air Sedunia atau *World Water Day* tahun 2024 pada Maret lalu. Peringatan yang mengangkat tema “*Leveraging Water For Peace*”, jika kita cermati secara umum bukan sekedar berbicara tentang air saja, topik ini juga berkenaan dengan upaya seruan perdamaian untuk dunia dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. Sebuah isu krusial, mengingat fenomena dunia yang saat ini adanya perang di kawasan Timur Tengah disertai dengan kelangkaan air bersih yang telah menjadi isu dan permasalahan global yang perlu dipecahkan bersama.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan hujan terluas ketiga di dunia, setelah Brazil dan Kongo. Atas dasar itulah, Indonesia menyandang predikat sebagai paru-paru dunia. Namun, banyaknya hutan hujan di tanah air ternyata tak lantas membuat Indonesia berkecukupan air bersih. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat untuk di manfaatkan dalam pertanian, peternakan, perdagangan, industri, rumah tangga dan aktivitas lingkungan.

Adalah sebuah ironi bahwa Pulau Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu yang potensi alamnya masih terjaga dengan baik sehingga masih banyak

hutan yang dilindungi, namun justeru masih banyak ditemukan masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama di wilayah perbatasan RI- Malaysia. Berkaitan dengan hal tersebut, Kodim 1206/Psb yang wilayah teritorialnya di wilayah tersebut berupaya untuk mengatasi kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan membangun/membuat sumur bor di beberapa titik yang benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat, yaitu:

1. Dusun Tanjung Pandan Desa Sibau Hulu Kec, Putussibau Utara.
2. Rumah Betang Dusun Dano Tuak Desa Sibau Hulu Kec, Putussibau Utara.
3. Gang Kelayak Dusun Dano Tuak Desa Sibau Hulu Kec, Putussibau Utara.
4. Desa Sibau Hulu Kec, Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu.





Ini merupakan implementasi dari komitmen TNI AD pada Program TNI AD Manunggal Air sejak digagas pada tahun 2022 oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dr. Dudung Abdurachman, ini adalah spiritnya yang berkesinambungan dan dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Keberadaan sumur bor yang telah dibangun Kodim 1206/Psb mendapat respon yang positif dari masyarakat. Masyarakat merasa sangat terbantu karena tidak perlu repot mencari air bersih di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga pada akhirnya masyarakat dapat bekerja dengan maksimal karena sudah tidak di bebani dengan pikiran untuk mendapatkan air bersih.



Setelah melihat respon positif dari masyarakat, maka Kodim 1206/Psb merencanakan akan menambah 12 titik lagi pembangunan sumur bor di beberapa tempat di wilayah Kapuas Hulu agar semua masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dapat menikmati dan memanfaatkan sumur bor sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pembangunan sumur bor diprioritaskan untuk daerah perbatasan yang mengalami krisis air bersih dan daerah tertinggal, dengan harapan ketersediaan air bersih mampu menunjang ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua belas titik tersebut yaitu:

1. Dusun Ulak Batu Desa Benua Ujung, Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu.
2. Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
4. Dusun Indu Linga Desa Ingkotambe Kec. Putussibau selatan Kab. Kapuas Hulu.
5. Dusun Tanjung Beruang Desa Tanjung Beruang Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
6. Dusun kampung Baru Desa Nanga Kantuk Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu.
7. Dusun Empakan Desa Keling Punggu Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu.
8. Dusun Belimbis Desa Belimbis Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu.
9. Dusun Lintas Utara Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
10. Dusun Buak Mainik Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
11. Dusun Manda Kelurahan Kedamin Darat Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
12. Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.



Pembangunan Sumur Bor di Dusun Tanjung Pandan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara

Program TNI AD manunggal Air Bersih ini merupakan salah satu program unggulan TNI AD yang sudah dicanangkan oleh Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak M.Sc. yang mana pada bulan lalu Kasad telah berkunjung di Wilayah Kodam XII/Tpr dalam rangka peresmian Sumur Bor di Kabupaten Bengkayang. Pengerjaan sumur bor ini merupakan salah satu wujud kepedulian TNI AD untuk membantu masyarakat yang saat ini mengalami krisis air bersih terutama saat kemarau panjang yang saat ini melanda di sebagian besar wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan tetap melakukan pengelolaan air tanah yang baik dimulai dari upaya perencanaan, pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, pembangunan sumur bor pada program TNI AD Manunggal Air tersebut merupakan hasil bantuan dari Kodim 1206/Psb, guna mengatasi krisis air bersih di wilayah perbatasan yang rawan terjadi kekeringan. Program air bersih di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan bagian dari Program TNI AD Manunggal Air Bersih di seluruh Indonesia dalam membantu masyarakat untuk mendapat air bersih, hal ini penting sekali karena air merupakan hal yang vital bagi sumber kehidupan umat manusia.

Babinsa jajaran Kodim 1206/Psb telah bekerja keras dalam menyelesaikan proyek sumur bor ini, mereka telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam melayani masyarakat, dengan selesainya 4 titik Sumur Bor yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu Perbatasan Ri-Malaysia, diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan warga dalam memperoleh air bersih, ini adalah bagian dari tugas kami sebagai aparat teritorial, untuk melayani dan membantu masyarakat mendapatkan air bersih, kami berharap sumur Bor ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar.

Pengerjaan sumur bor ini juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah serta warga setempat, karena mereka merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang di berikan oleh Kodim 1206/Psb, dengan selesainya pengerjaan sumur Bor ini di harapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warga dan juga menjadi bukti nyata dari dedikasi dan komitmen dalam membantu masyarakat.

Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup terutama bagi manusia. Air sangat penting bagi manusia, di sejumlah tempat di dunia terjadi kelangkaan air karena banyak orang yang belum tau cara mengelola air dengan benar. Adanya kelangkaan air akan semakin parah jika tidak segera dilakukan penanganan lebih lanjut, tentunya, jika penanganan kelangkaan air tidak dilakukan maka dapat menghambat perkembangan di suatu wilayah. Demikian halnya yang telah dilakukan oleh Kodim 1206/Psb untuk mengatasi kesulitan rakyat mendapat air bersih adalah dengan membangun sumur Bor yang telah banyak membantu masyarakat di wilayah perbatasan.

Demikianlah tulisan tentang Pengabdian Kodim 1206/Putussibau dalam mengatasi krisis air bersih di wilayah perbatasan guna mendukung keberhasilan tugas pokok satuan.



PERAN SATUAN TUGAS PENGAMANAN PERBATASAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PERBATASAN RI-MALAYSIA WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Oleh: Letkol Arm Andreas Prabowo Putro, S.I.P., M.I.P., M.Han
(Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 16/TK)

TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI itu dilakukan dengan Operasi militer untuk perang (OMP) dan Operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu tugas yang dilaksanakan pada OMSP yaitu mengamankan wilayah perbatasan negara. Wilayah perbatasan mempunyai peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Wilayah perbatasan pada perkembangan selanjutnya berperan sebagai beranda depan NKRI yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Salah satu tugas pengamanan wilayah perbatasan negara yaitu melaksanakan operasi pengamanan wilayah perbatasan darat RI-Malaysia (disingkat RI-Mly) di Provinsi Kalimantan Barat. Daerah Kalimantan Barat memiliki wilayah perbatasan darat langsung dengan Malaysia (Serawak) dengan panjang daerah perbatasan darat membujur

sepanjang ±966 Km. Berdasarkan konsep operasi Satgas Pamtas RI-Mly saat ini, pengamanan perbatasan RI-Mly wilayah Kalimantan Barat dilaksanakan oleh 2 Batalyon yaitu Yonarmed 16/Tumbak Kaputing di sektor barat yang tergelar sejumlah 27 Pos dengan jumlah personel sebanyak 350 personel dan Yonarmed 10/Brajamusti di sektor timur yang tergelar sejumlah 25 Pos dengan jumlah 350 orang personel. Selain itu, dalam pelaksanaan Operasi di perbatasan juga terdapat Satgas Teritorial dan Satgas Intel yang mendukung pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan.

Diharapkan dengan adanya gelar pasukan pengamanan perbatasan darat RI-Mly tersebut dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang terdapat di perbatasan diantaranya masalah patok perbatasan, penyelundupan narkoba dan barang-barang ilegal serta *human trafficking* dari para pelintas batas yang memanfaatkan sibuknya jalur transportasi antar negara. Namun pada kenyataannya pelaksanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan darat RI-Mly di Kalimantan Barat selama ini masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya banyaknya jumlah jalur non prosedural yang berada di sepanjang perbatasan RI-Mly, jumlah personel Satgas Pamtas yang ditugaskan dihadapkan pada luasnya wilayah perbatasan darat yang harus dijaga dan diamankan serta terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh pasukan pengamanan perbatasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas memegang peranan penting dalam melaksanakan operasi pengamanan wilayah perbatasan negara guna memelihara dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Mly. Permasalahan keamanan yang muncul di kawasan perbatasan tersebut masih terus terjadi dan utamanya penyelundupan barang berbahaya seperti narkoba, sehingga dalam hal ini Satgas Pamtas memegang peranan penting untuk melakukan pengamanan di wilayah perbatasan darat serta yang tidak kalah pentingnya yaitu membantu pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan darat RI – Mly di Kalimantan Barat.

Adapun pokok-pokok permasalahan yang diangkat diantaranya, sebagai berikut: Pertama, bagaimana peranan Satgas Pamtas RI-MLY dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat?; kedua, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Satgas Pamtas RI- MLY dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat?; dan ketiga, bagaimana solusi yang dilakukan Satgas Pamtas RI-Mly dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat?

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas operasi pengamanan perbatasan darat RI-Mly dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan peran seluruh stakeholder terkait di perbatasan guna tegaknya kedaulatan NKRI di perbatasan negara sesuai amanat undang-undang. Sedangkan ruang lingkupnya mencakup pelaksanaan operasi perbatasan darat RI-Mly yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Barat sektor Barat khususnya terkait kegagalan penyelundupan narkoba, melalui pendekatan deskriptif empiris berdasarkan pengalaman penulis sebagai Dansatgas Pamtas RI-Mly Yonarmed 16/Tumbak Kaputing.



PENANGKAPAN NARKOBA OLEH POS GABMA TEMAJUK DENGAN TERSANGKA 3 ORANG, BARANG BUKTI 15,75 KG SABU

Untuk dapat lebih memahami masalah penyelundupan dan peredaran narkoba yang sebenarnya di wilayah perbatasan darat RI-Mly, diperlukan data dan fakta yang aktual. Data dan fakta tersebut diperoleh dari Satuan Satgas Pamtas RI-Mly Yonarmed 16/TK sektor Barat Kalimantan Barat yang saat ini sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan, dengan jumlah kegagalan penyelundupan narkoba yaitu Sabu-sabu seberat total 27.976,09 gram dan 10.000 butir Pil Ekstasi seberat 3.437 gram.



PENANGKAPAN NARKOBA OLEH POS GUNA BANIR DENGAN BARANG BUKTI 10 KG SABU

Rincian kasus hasil tangkapan narkoba sebanyak 13 kasus, antara lain:

- a. Pos Koki Gabma Jagoi Babang (14-06-2023) dipimpin Serda Ade Wahyudin beserta 3 orang anggota menggagalkan penyelundupan Sabu-sabu seberat 0,25 gram pada Co. 383464-146385 Pos Dalduk Koki Gabma Jagoi Babang di Dsn. Jagoi Babang Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Prov. Kalbar.
 - b. Pos Kumba Semunying (30-06-2023) dipimpin Kopda Mursyid beserta 2 orang anggota menggagalkan penyelundupan Sabu-sabu seberat 8 gram pada Co. 369969 – 163959 di jalan tikus dari arah Mly dekat Patok D603 (Kerucut).
 - c. Pos Kumba Semunying (6-07-2023) dipimpin Praka Denis beserta 3 orang anggota menggagalkan penyelundupan Sabu-sabu seberat 5 gram pada Co. 363031-164750 di jalan kebun PT. Ledo Lestari 1 Divisi 6 Ds. Semunying Jaya Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Prov. Kalbar.
 - d. Pos Kumba Semunying (27-07-2023) dipimpin Serda Victor beserta 3 orang anggota menggagalkan penyelundupan Sabu-sabu seberat 11,34 gram pada Co. 366851-164504 (Dekat Patok D523) di jalan JIPP Ds. Semunying Jaya Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Prov. Kalbar.
 - e. Pos Sentabeng dipimpin Lettu Arm Encek dan 3 orang anggota Dan Pos Sei Saparan Dipimpin Letda Arm Dimas dan 7 orang anggota (29-07-2023) menggagalkan penyelundupan Sabu-sabu seberat 1.059 gram dan Pil Ekstasi warna merah seberat 3.437 gram pada Co. 378016 - 156667 di Ds. Belidak Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Prov. Kalbar.
 - f. Pos Guna Banir (07-08-2023) dipimpin Serka Ardhita Nico dan 5 orang anggota menggagalkan penyelundupan Sabu-sabu seberat 10.880,03 gram pada Co. 4482 - 4572 di Dsn. Guna Banir Ds. Sei Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau Prov. Kalbar.
 - g. Pos Koki Sajingan Terpadu (11-08-2023) Dipimpin Kapten Arm Rimi Sugara dan 4 orang anggota menggagalkan penyelundupan Sabu-sabu seberat 0,01 gram pada Co. 352652-177614 di Dsn. Tanjung Ds. Senatab Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas Prov. Kalbar.
 - h. Pos Koki Sajingan Terpadu (07-09-2023) dipimpin Sertu Parulihan Sihombing dan 5 orang anggota menggagalkan penyelundupan Sabu-sabu seberat 1 gram pada Co. 178130-353510 di Dsn. Aruk Ds. Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas Prov. Kalbar.
 - i. Pos Sentabeng (15-10-2023) dipimpin Serda Angga dan 3 orang anggota Sabu-sabu seberat 17,96 gram pada Co. 152839 - 385027 di Jalan BJI (Bukit Jagoi Indah) Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Prov. Kalbar.
 - j. Pos Gabma Temajuk (28-10-2023) dipimpin Serda Yohanes Tommi dan 5 orang anggota menggagalkan penyelundupan Sabu-sabu seberat 15.960,5 gram pada Co. 347625-222138 di Dsn. Sempadan Ds. Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas Prov. Kalbar.
 - k. Pos Bantan (18-11-2023) dipimpin Serka Bayu Irawan dan 3 orang anggota sabu-sabu 25,28 gram pada co. 37200-92133 di Dsn. Balai IV Ds. Balai karangan Kec. Sekayam, Kab. Sanggau. Prov. Kalbar.
 - l. Pos Koki Balai Karangan (28-11-2023) dipimpin Prka Ayus beserta 3 orang anggota menggagalkan sabu-sabu 8 gram pada co. 33425-85516 di pos Dalduk Jl. Lintas kalimantan poros utara Ds. Thang Raya Kec. Beduai Kab. Sanggau. Prov. Kalbar.
- Satu Kasus tanpa barang bukti narkoba. Pos Bantan mengamankan pengguna dan alat hisap sabu sabu (21-06-2023).



Berdasarkan data tersebut, ternyata peredaran narkotika internasional masuk ke Indonesia khususnya wilayah Kalimantan Barat sekarang melalui jalur-jalur perbatasan. Jaringan narkotika internasional ini terus mencari celah untuk masuk dengan tetap target Indonesia sebagai pangsa pasar potensial.

Peranan Satgas Pamantas RI-MLY Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat.



PENANGKAPAN NARKOBA OLEH POS KUMBA SEMUNYING DENGAN TERSANGKA 1 ORANG, BARANG BUKTI 8 GRAM SABU

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkotika ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5% dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Peredaran gelap narkotika melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan

masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum.

Dalam hal ini peranan satgas Pamantas RI-MLY yang memiliki tugas melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-MLY sesuai dengan perintah operasi, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengamanan ambush dan sweeping sesuai dengan koordinat di pos perbatasan yang menjadi sektor pengamanan wilayah.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait seperti BNN dan Polri serta Stakeholder lainnya dalam rangka melaksanakan operasi gabungan pemeriksaan di wilayah pos perbatasan.
- c. Ikut melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan siswa sekolah tentang bahaya mengkomsumsi narkoba.
- d. Bekerjasama dengan aparat Satgas Intel (Satgas Bais, BIN, SGI) termasuk Satgaster (Kodim di perbatasan) dan masyarakat yang dapat dipercaya di wilayah perbatasan untuk mendapatkan informasi adanya kegiatan peredaran narkoba.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Satgas Pamantas RI-Mly dalam menanggulangi penyelundupan Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkotika (the drug trafficking industry), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (Activities of Transnational Criminal Organizations). Peredaran gelap narkotika bahkan semakin berkembang dengan

semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Pada saat ini Indonesia tidak hanya sekedar menjadi daerah transit/lalu lintas narkotika karena posisinya yang strategis. Jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang strategis dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi, dimana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan rapuh telah mendorong Indonesia menjadi daerah tujuan perdagangan narkotika.



PENANGKAPAN NARKOBA OLEH POS GABMA KOKI JAGOI BABANG DENGAN TERSANGKA 1 ORANG, BARANG BUKTI 0,25 GRAM SABU

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi Satgas Pamantas RI-MLY dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya dukungan alat canggih/detektor yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkotika bagi Satuan yang mekasanakan tugas Satgas Pamantas RI-MLY serta dukungan anjing pelacak khusus untuk membantu dalam melaksanakan tugas sweeping ataupun ambush bagi Satgas Pamantas RI-MLY.
- b. Belum dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat guna mencegah penyelundupan

dan peredaran gelap narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi tersebut terdiri dari petugas/aparat TNI, BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pintu masuk jaringan narkotika internasional.

- c. Banyaknya jalur/jalan tidak resmi antara perbatasan Kalimantan Barat, sehingga menimbulkan celah bagi para pengedar narkoba untuk memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia.
- d. Masih adanya Pos Lintas Batas tidak berjalan secara maksimal dikaitkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana seperti gedung, kendaraan ataupun perlengkapan lainnya yang mendukung tugas serta medan yang cukup sulit dijangkau di daerah perbatasan.

Dengan melihat berbagai kendala/hambatan yang dihadapi Satgas Pamantas RI-MLY dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, tentu saja memerlukan solusi yang tepat agar dapat dilakukan pemecahan masalah tersebut. Pesatnya peredaran dan penjualan narkotika secara ilegal, menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap narkotika ini perlu mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam rangka menciptakan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pemerintah dan aparat keamanan tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan, bantuan dan kerjasama yang baik dengan komunitas lokal yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal.

Beberapa solusi dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kerjasama kegiatan sinergitas antar stakeholder di wilayah perbatasan dengan membentuk Satgas Interdiksi

lintas sektor dengan komitmen kuat terhadap perang terhadap narkoba (War On Drugs) dimana tidak ada kompromi dengan jaringan penyelundup dan pengedar narkoba;

- b. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Sembako), pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi yang sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat perbatasan.
- c. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kejahatan narkoba.
- d. Dukungan sarana prasarana yang memadai dan alat yang canggih bagi personel/satuan TNI yang melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY.

Dari uraian pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil diantaranya, sebagai berikut; pertama, dalam pelaksanaan tugas Satgas Pamtas RI-MLY wilayah perbatasan Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik, namun dirasakan belum optimal dikarenakan masih adanya sifat egosentris/kurangnya kerjasama dari beberapa pihak/stakeholder untuk memberikan informasi yang akurat terjadinya kejahatan pengedaran narkoba dan berkesan mencari nama masing-masing instansi. Kedua, beberapa hambatan yang menjadi masalah bagi Satgas Pamtas RI-MLY, seperti belum terdukungnya peralatan pendukung yang canggih dalam melaksanakan pengamanan ambush dan sweeping, belum terbentuknya Satgas Interdiksi dari instansi/stakeholder sedikit menimbulkan kesulitan dalam berkoordinasi apabila terjadi kejadian penangkapan kejahatan narkoba, masih banyaknya jalan-jalan tikus di wilayah perbatasan yang menyulitkan pelaksanaan sweeping/ambush dihadapkan dengan jumlah personel di pos yang minim serta belum maksimalnya pos Lintas Batas di beberapa titik/wilayah perbatasan dihadapkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana dan

medan yang cukup sulit untuk ditempuh.

Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan solusi dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat diantaranya; pertama, mohon dapatnya dibentuk Tim/Satgas Interdiksi dengan komitmen war on drugs yang tidak berkompromi dengan penyelundup dan pengedar narkoba. Kedua, mohon dapatnya difasilitasi dengan kementerian/Lembaga terkait tentang pembangunan infrastruktur seperti sarana prasarana jalan akses di desa-desa perbatasan, listrik, sinyal internet dan air bersih di wilayah perbatasan untuk memajukan perekonomian dan sumber daya manusia masyarakat perbatasan sehingga tidak tergalang oleh jaringan penyelundup dan pengedar narkoba. Ketiga, dukungan yang selama ini telah diusulkan kepada satuan yang melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY berupa alat yang canggih/detektor dalam membantu kegiatan pengintaian dan pemeriksaan, diantaranya drone dan anjing pelacak mohon dapatnya segera direalisasikan.



LABORATORIUM FORENSIK-BIOMETRIKA:

OPTIMALISASI DUKUNGAN POLISI MILITER SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM GUNA KEBERHASILAN OPERASI DAN PENGAMANAN TNI AD

Oleh: Mayor Cpm Ibrahim Rahman Putra, S.H.
(Kasigakkum Pomdam XVIII/Ksr)

Dalam masa 20 tahun mendatang, perkembangan modus kejahatan yang merambah berbagai macam sektor dari yang semula fisik sampai dengan sektor siber. Tidak menutup mata, sekto siber di lingkungan militer negara-negara di dunia akan berkembang secara progresif. Hal ini akan menyebabkan risiko ancaman dan kerawanan dalam pengamanan tubuh TNI AD semakin luas, termasuk ancaman dan kerawanan dari domain siber.

Polisi Militer memiliki peran penting dalam menjaga keamanan internal TNI AD, dengan fungsi-fungsi seperti penyelidikan dan pengamanan fisik (*criminal intelligence and physical security*), penegakan hukum (*law enforcement*), penyidikan (*investigation*), pengawalan (*close protection*), dan pembinaan tahanan militer (*corrections*). Namun, dalam penerapannya, cabang Polisi Militer masih belum secara optimal menyelenggarakan penegakan hukum

secara mandiri sehingga bergantung pada institusi lain seperti Polri dan Badan Intelijen Negara. Ini menciptakan kerawanan karena unsur kepentingan militer TNI AD dapat terekspos ke institusi non militer. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan optimalisasi forensik-biometrika oleh Polisi Militer untuk menegakkan hukum dan mengamankan tubuh (*internal security*) di institusi TNI AD sebagaimana penegakan hukum dalam arti luas sangat erat kaitannya dengan upaya guna mengatasi risiko yang teridentifikasi (*identified risk*) dalam sebuah operasi pengamanan. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya peran dukungan forensik-biometrika satuan Laboratorium Kriminal Polisi Militer. Oleh karena itu, perlu dirumuskan bagaimana mengoptimalkan peran cabang Polisi Militer, khususnya dukungan forensik-biometrika oleh Laboratorium Kriminal Polisi Militer untuk menegakkan hukum dan memastikan keberhasilan operasi militer serta mengamankan tubuh TNI AD.



Pelaksanaan Pul Biometrika oleh Personel US Defense Forensic Biometric Agency di daerah operasi

Data dan fakta menunjukkan banyak sekali pergeseran dalam kondisi sosial masyarakat umum dan masyarakat militer pada khususnya dengan penggunaan teknologi komunikasi serta informatika yang masif. Data dan fakta menampilkan bahwa 67,1% populasi manusia yang ada dunia menggunakan ponsel pintar sebagai gawai harian dan 58,4% penduduk dunia memiliki akun media sosial serta aktif menggunakannya (Al-Azhar, 2022). Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki negara dengan jumlah populasi peringkat III terbesar di dunia juga memiliki kondisi sosio-demografi yang serupa dengan kondisi dunia pada umumnya. Data dan fakta menunjukkan 73,7% dari penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif internet dan 68,9% merupakan pengguna aktif media sosial.

Jumlah personel aktif militer TNI saat ini adalah ± 400.000 orang personel dan belum termasuk ASN beserta keluarga besar TNI secara langsung akan terpengaruh dengan iklim sosio-demografi yang berubah disebabkan

masifnya penggunaan teknologi komunikasi pada satu dekade belakangan ini. Diseminasi informasi yang cepat menginginkan publik selaku pembayar pajak menginginkan adanya penyidikan/ investigasi yang masuk akal dengan diperkuat pembuktian ilmiah sehingga diterima logika masyarakat. Beberapa kejadian di lingkungan TNI AD sudah terjadi seperti kejadian meledaknya Gudmurah milik Paldam Jaya di Ciangsana Bogor, kejadian kecelakaan helikopter latih Bell 412 di Rancabali Bandung, dan kejadian-kejadian lainnya, namun dukungan fungsi laboratorium kriminal forensik-biometrika guna mengungkap fakta masih belum diselenggarakan oleh TNI AD, namun oleh Puslabfor Mabes Polri.

Polisi Militer sebagai kecabangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan penegakan hukum di lingkungan TNI AD harus mampu menghadapi tantangan perkembangan sosio-demografi yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat militer khususnya lingkungan TNI AD. Salah satu unsur dalam penegakan hukum adalah

penyelenggaraan laboratorium kriminal (Labkrim) di mana merupakan sub-elemen dari fungsi penyidikan di dalam kecabangan Polisi Militer. Kondisi yang diharapkan adalah kecabangan Polisi Militer mampu menyelenggarakan laboratorium kriminal meliputi lima fungsi forensik selayaknya laboratorium forensik kriminal yang dimiliki oleh institusi Polisi Militer negara maju seperti U.S. *Defense Forensic and Biometric Agency*. Kelima kemampuan forensik yang dimiliki antara lain: pertama, forensik patologi guna menyelenggarakan forensik bagi jejak darah dan DNA; kedua, forensik balistik-metalurgi guna menyelenggarakan forensik bagi jejak peralatan, jejak senjata api, munisi, dan bahan peledak; ketiga, forensik daktiloskopi-biometrika guna menyelenggarakan forensik pada jejak sidik jari dan keunikan biometri; keempat, forensik narkotika guna menyelenggarakan forensik bagi narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang; dan kelima, forensik digital guna

menyelenggarakan forensik bagi jejak digital pada komputer dan gawai. Selain kelima kapabilitas forensik di tingkat pusat maka di tingkat daerah juga harus terdapat *unit forensic exploitation* dengan kekuatan personel kurang lebih lima sampai dengan enam orang yang terlatih dalam menyelenggarakan kegiatan dan/ atau *operasi sensitive site exploitation* sehingga Labkrim mampu segera mendukung pengguna di lapangan dengan tepat waktu. Dengan postur, gelar, dan kekuatan dari kemampuan forensik milik kecabangan Polisi Militer maka penegakan hukum guna pengamanan tubuh TNI AD akan dapat terselenggara dengan lebih optimal dan dukungan sensitive site exploitation secara mandiri pada sebuah operasi militer pertempuran terdukung tanpa mesti tergantung kepada laboratorium forensik milik institusi tetangga khususnya Puslabfor Mabes Polri.



Pelaksanaan Pul Daktiloskopi di Rahops oleh Petugas Polisi Militer US Army

Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, TNI AD secara konsisten mengampanyekan sasaran sebagai the World Class Army yang resonansinya sampai ke kecabangan Polisi Militer. Berangkat dari goal TNI AD menjadi World Class Army maka taktik penyidikan di dalam tubuh TNI AD mesti bergeser dari penyidikan yang semula bersifat tradisional menjadi taktik penyidikan berbasis sains (*scientific crime investigation/*

SCI). Penyidikan berbasis sains adalah *a method used in criminal proceedings that leverages scientific principles and interdisciplinary knowledge to support the process of proving criminal cases* (Anwar, 2022). SCI memiliki perbedaan dengan penyidikan tradisional meliputi: pertama, SCI bergantung kepada prinsip-prinsip berbasis sains, alat bukti yang empiris, dan menggunakan metodologi yang ketat sedangkan penyidikan tradisional pada umumnya bergantung kepada pemeriksaan/wawancara saksi, alat bukti, dan intuisi; kedua, SCI menekankan penggunaan ilmu forensik, analisis DNA, dan metode sains lainnya pada pengumpulan alat bukti sedangkan penyidikan tradisional berdasarkan pernyataan saksi, analisis forensik, dan pengamatan fisik; dan ketiga, SCI memerlukan pembuktian berdasarkan alat bukti berbasis sains (*scientific*) dan kesimpulan logika sedangkan taktik penyidikan tradisional melaksanakan penyelidikan lebih berdasarkan alat bukti yang belum pasti (*circumstantial evidence*). Di dalam institusi TNI AD, penyelenggaraan forensik berada pada satuan kecabangan Polisi Militer. Kualitas Laboratorium Kriminal Polisi Militer yang

telah unggul juga memiliki dampak untuk penggunaannya tidak hanya sekedar pada pembuktian guna memenuhi unsur pembuktian dalam peradilan militer, namun bermanfaat digunakan dalam operasi militer khususnya operasi kontra insurgensi. U.S. Army menuliskan, "The collection of physical evidence and follow-on forensic analysis can also enable operating forces to identify enemies and add depth and scope to the intelligence picture (U.S. Department of Army, 2015). Urgensi meningkatkan kapabilitas Laboratorium Kriminal Puspomad menjadi Laboratorium Forensik-Biometrika merupakan mutlak di era modern bagi TNI AD.



Pengambilan sampel rambut oleh anggota labkrim Puspomad

Dengan landasan teori dan referensi yang mendukung saja tidak cukup sebab guna mewujudkan peranan dukungan forensik-biometrika dalam rangka penegakan hukum bagi dan untuk kepentingan TNI AD pasti menjumpai hambatan dari dalam dan kendala dari luar. Hambatan yang dihadapi adalah: pertama, postur organisasi Laboratorium Kriminal Puspomad yang belum sesuai dengan postur laboratorium forensik-biometrika yang koheren dengan forensik modern meliputi lima kemampuan forensik; dan kedua, gelar dukungan forensic exploitation belum menyentuh tingkat daerah (Pomdam dan Denpomdam) yang merupakan satuan operasional utama Polisi Militer dalam operasi dan kegiatan penegakan hukum. Kendala dari luar yang dihadapi adalah: pertama, belum ada peranti lunak yang mengatur mekanisme dukungan forensik-biometrika sebagai sensitive site exploitation dalam sebuah operasi militer; dan kedua, belum adanya kesepahaman mekanisme hubungan kerja antara kecabangan Polisi Militer dengan bidang intelijen khususnya dalam pembinaan dan penggunaan kemampuan dukungan forensik-biometrika. Hambatan dan kendala ini bisa diatasi namun memang memerlukan langkah-langkah yang konkret.



Pengambilan sampel darah oleh anggota labkrim Puspomad



Pelaksanaan Tes Narkotika oleh Labkrim Puspomad



Ransus forensik Labkrim Puspomad

Upaya guna mengatasi hambatan dan kendala yang ada meliputi: pertama, menyelenggarakan revisi peranti lunak organisasi dan tugas (Orgas) Puspomad guna meningkatkan Orgas Labkrim Puspomad menjadi satuan operasional yang terpisah dengan Orgas Mapuspomad sehingga Laboratorium Forensik-Biometrika akan berdiri sendiri dengan lima kemampuan forensik walaupun masih dalam pembinaan Puspomad selaku Balakpus Kepolisian Militer; kedua, pembuatan peranti lunak yang matang untuk operasional organisasi Laboratorium Forensik-Biometrika Polisi Militer di mana salah satunya menyiapkan sistem pembinaan personel (karier) dengan kualifikasi khusus sehingga menghilangkan opini Labkrim Puspomad yang ada sekarang merupakan satuan "buangan", namun nantinya Laboratorium Forensik-Biometrika merupakan satuan elite; ketiga, menyelenggarakan pengkajian dan validasi ulang peranti lunak Orgas Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) sehingga terdapat satu unit *forensic exploitation* di tingkat Pomdam yang mampu digunakan mendukung operasi Kepolisian Militer, operasi intelijen,

dan operasi militer lawan insurjensi melalui *sensitive site exploitation*; keempat, menyiapkan komponen satuan yang diperlukan dalam pembentukan *unit forensic exploitation* tingkat daerah dengan cara menyiapkan personel yang diperlukan bersumber dari rekrutmen tingkat pusat dan menyiapkan pangkalan beserta materiel yang diperlukan agar unit yang nantinya dibentuk sampai dengan tingkat daerah dapat beroperasi penuh; kelima, berkoordinasi dengan Staf Umum TNI AD yaitu Sintelad, Sopsad, dan Srenad agar membuat peranti lunak perlindungan (*protection*) yang merupakan turunan dari Doktrin Operasi Militer Matra Darat "Kartika Yudha" di mana isinya nanti akan menguraikan peran serta tugas Laboratorium Forensik-Biometrika menyelenggarakan *sensitive site* dan *forensic exploitation* sebagai bagian unsur perlindungan baik dukungan dalam operasi kepolisian militer, dukungan dalam operasi pengamanan wilayah, dukungan operasi pengendalian penduduk, dukungan operasi prosedur keamanan prajurit hingga dukungan operasi pengamanan-pertahanan siber; keenam, mengujikan tugas dan peran Laboratorium

Forensik-Biometrika dalam operasi militer selain perang bersifat pertempuran dengan cara menyertakannya personel *Unit Forensic Exploitation* dalam Satgas Pamrahwan di Aceh, Poso, Maluku, dan Papua serta menyertakan juga *Unit Forensic Exploitation* ini dalam Satgas Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua; ketujuh, menyelenggarakan diskusi bersama Sintelad, Sopsad, Puskesad, Pusintelad, Ditkumad dan Pussansiad guna merumuskan prosedur mekanisme hubungan kerja Laboratorium Forensik-Biometrika nantinya dalam menyelenggarakan dukungan forensik dalam operasi militer serta pengamanan tubuh TNI AD dengan melibatkan thinktank tiap institusi dalam sebuah focus group discussion; dan kedelapan, menyelenggarakan proses akreditasi kelima fungsi forensik Laboratorium Forensik-Biometrik dengan cara belajar dari Puslabfor Mabes Polri dan studi komparasi dengan institusi laboratorium forensik milik institusi militer negara-negara maju (Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, dan lain-lain) sehingga hasil forensik yang dihasilkan dapat digunakan dan valid sebagai intelijen maupun lingkungan peradilan di Indonesia (Peradilan Umum dan Peradilan Militer).

Demikian dapat disimpulkan bahwa TNI AD khususnya Puspomad selaku Balakpus fungsi Kepolisian Militer mutlak memerlukan Laboratorium Forensik-Biometrika yang mampu menyelenggarakan lima fungsi forensik dalam rangka penegakan hukum guna keberhasilan operasi dan pengamanan tubuh. Hal ini mutlak sebab penegakan hukum khususnya penyelenggaraan forensik-biometrika erat kaitannya dengan kepentingan militer sehingga harus dapat dimitigasi dari eksposur ke institusi nonmiliter. Upaya yang harus dilakukan memerlukan tenaga ekstra dan sinergi seluruh pengampu kepentingan meliputi Puspomad, Sintelad, Sopsad, Srenad, Puskesad, Ditkumad, Pusintelad, dan Pussansiad sehingga upaya yang dilakukan menghasilkan hasil sesuai harapan serta keinginan.

Adapun saran-masukan yang dapat disampaikan kepada Pimpinan TNI AD, para unsur Pimpinan Staf Umum TNI AD, dan para Pejabat Utama Puspomad adalah mohon kiranya dapat menyelenggarakan reorganisasi dan validasi Laboratorium Kriminal Polisi Militer menjadi Laboratorium Forensik-Biometrika yang lengkap dari tingkat pusat sampai dengan unsur pelaksana tingkat daerah serta mampu menyelenggarakan dukungan kelima fungsi forensik guna kepentingan operasi militer TNI AD dan operasi penegakan hukum agar mampu memitigasi risiko kerugian personel, materiel, serta gagalnya operasi militer TNI AD.

PENSIUN BAHAGIA

“Pensiun itu pasti, tapi pensiun bahagia adalah sebuah pilihan hidup”. Sebagai sebuah pilihan, pensiun bahagia harus diperjuangkan karena bukan merupakan rahmat Tuhan yang gratis, *“take it for granted”*. Selain strategi yang tepat, pensiun bahagia memerlukan persiapan sejak dini.





Oleh: Drs. Tatang Nuryaman, M.M.
(Kasitab Bagyanpers Bidperslog
Sdirum RSPAD Gatot Soebroto)



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pensiun” menyiratkan dua makna. Sebagai kata kerja, bermakna “tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai”. Sedangkan sebagai kata benda, bermakna “uang tunjangan yang diterima setiap bulan oleh pegawai sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri/suami dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia”. Secara harfiah, pensiun bermakna “penghasilan yang diterima setiap bulan oleh bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain”.

Ada sejumlah fakta menarik tentang pensiun yang perlu dicermati dan dicarikan jalan keluar sebagai bagian dari masalah kehidupan. **Pertama**, negara atau perusahaan hanya membantu menyisakan sebagian kecil penghasilan untuk mendanai hari tua. Berdasarkan Indeks Pensiun CFA *Institute* tahun 2023, Indonesia memperoleh total nilai indeks 49,2 (Total nilai indeks Malaysia 63,1 dengan besaran uang pensiun pegawai pemerintah sebesar 20% - 50% dari upah dan uang pensiun anggota angkatan bersenjata sebesar 10% dari gaji pokok ditambah 15% dari pemerintah). Anggota TNI, anggota Polri dan PNS di Kementerian Pertahanan dan Polri yang menjadi peserta ASABRI membayar iuran sebesar 10% dari gaji pokok per bulan. Iuran terdiri dari 4,75 % untuk dana pensiun, 3,25% untuk Tabungan Hari Tua, dan 2% untuk dana kesehatan. Pegawai peserta TASPEN membayar iuran sebesar 4,75% kali penghasilan sebulan/gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Peserta BPJS Kesehatan, Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri membayar iuran sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Dana tersebut biasanya hanya cukup untuk membiayai selama beberapa tahun setelah memasuki masa pensiun atau

belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan setelah pensiun yang berakibat pada penurunan kualitas hidup.

Kedua, rata-rata keluarga modern memiliki jumlah anak sedikit, 1 – 2 anak. Selain itu, usia pernikahan juga mengalami perubahan, 21 - 25 tahun. Kemungkinannya adalah ketika pensiun, anak-anak mungkin belum bisa support diri mereka sendiri secara finansial karena masih berada di awal karir, apalagi support kehidupan orang tua di masa pensiun. Selain itu, ada kemungkinan pada masa pensiun masih ada kewajiban/tugas untuk mengantarkan anak-anak bisa mandiri, seperti membiayai kuliah di perguruan tinggi.

Ketiga, tidak semua orang bisa dipekerjakan kembali setelah pensiun, kecuali jika memiliki usaha atau perusahaan sendiri, memasuki usia pensiun pun masih bisa bekerja. Pengalaman dan profesionalitas kerja yang dimiliki selama ini, dapat menjadi “modal” untuk bisa membuka usaha atau bekerja di tempat baru. Banyaknya anggota legislatif senior dan pejabat negara berusia di atas 60 tahun, serta tenaga konsultan yang berlatar belakang pensiunan dapat menjadi bukti bahwa pensiun bukan akhir segalanya, namun sejatinya merupakan kesinambungan untuk tetap bisa bekerja dan berkarya. Jika ingin berbisnis sendiri, perlu dibuat perencanaan yang matang dan memastikan dukungan finansial yang cukup, dan rencana berbisnis ini sudah mulai dipersiapkan sebelum usia pensiun resmi tiba.

Keempat, memasuki masa pensiun, setiap pegawai mengalami penurunan penghasilan, *take home pay*, yang sangat drastis. PNS aktif yang masuk usia pensiun, hanya menerima 2,5% x masa kerja x gaji pokok terakhir + tunjangan, dengan keterangan jumlah uang pensiun yang diterima maksimum adalah 75% dan minimum 40% dari gaji pokok. Pensiunan tidak lagi menerima tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan jabatan dan tunjangan umum. Kondisi demikian menuntut pensiunan untuk tetap produktif pada usia pensiun. Dengan kesehatan, energi dan semangat serta

pengalaman yang dimiliki, persiapan harus bisa berpenghasilan minimal sama dengan *take home pay* yang diterima saat masih aktif/berdinis.

Kelima, tak dapat dipungkiri bawa seiring dengan bertambahnya usia, pada usia pensiun mengalami penurunan “*quality of life*” bersamaan dengan “*injury time*” usia pensiun yang memerlukan peningkatan “*quality of dying*”. Laporan *National Council on Aging* yang berkantor pusat di Washington DC, menyatakan bahwa 80% orang dewasa di atas usia pensiun memiliki satu kondisi kesehatan kronis, dan 68% memiliki lebih dari satu kondisi kesehatan kronis. Selain itu, berdasarkan tinjauan literatur terungkap fakta bahwa kualitas kematian bersifat multidimensi dengan 7 domain luas, salah satunya persiapan kematian.



Fakta-fakta tersebut menuntut calon pensiunan untuk mempersiapkan dirinya sendiri agar bisa menjalani masa pensiun dengan tenang dan nyaman. Persiapan dilakukan sedini mungkin agar dapat membantu dalam menyiapkan diri, baik mental maupun finansial. Persiapan mental sebelum pensiun harus dimatangkan agar tidak memberikan dampak buruk secara psikologis. Profesor Emerita Dr. Nancy K. Schlossberg, profesor konseling *University of Maryland* yang telah mempelajari segala jenis transisi kehidupan, merekomendasikan lima aspek untuk mempersiapkan mental calon pensiunan.

Happy Retirement

Pertama, memahami identitas diri. Identitas diri adalah proses menjadi seorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup (Papalia 2008). Identitas diri juga bermakna suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang rentang kehidupan (Desmita 2008). Pensiun secara otomatis meninggalkan identitas diri yang dimiliki selama ini, misalnya jabatan pada instansi pemerintah atau perusahaan. Calon pensiunan harus mulai merancang identitas baru misalnya pensiunan PNS atau usahawan. Meskipun sebagian besar orang menyebutkan dirinya sebagai pensiunan PNS atau usahawan namun seiring dengan berjalannya waktu mereka juga ingin memulai hidup baru dengan tidak menghubungkan identitas saat ini dengan karir yang dulu pernah dijalani. Dengan memahami identitas diri dapat menghindarkan diri dari post power syndrome yang biasa menjangkit seseorang yang kehilangan jabatan atau kekuasaan. Selain itu, calon pensiunan harus memahami benar bahwa jabatan

atau kekuasaan yang diemban selama ini tidak lebih dari sebuah “amanah” yang setiap saat bisa diambil oleh pemiliknya, dalam hal ini negara atau perusahaan.

Kedua, membangun hubungan dengan orang lain. Hal nyata yang dihadapi saat memasuki masa pensiun adalah tidak adanya kesempatan berinteraksi secara langsung dengan rekan kerja. Pada masa pensiun, pegawai tidak lagi punya kesempatan untuk membangun jejaring kerja personal dan kolaborasi dengan rekan kerja. Oleh karenanya, masa pensiun bukan menjadi alasan menurunnya intensitas interaksi sosial namun sebaliknya harus tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Pada era digital saat ini, orang-orang akan sangat mudah terhubung baik secara personal maupun sebagai komunitas, misalnya reuni, arisan atau *travelling*. Banyak hal dapat diraih dari hubungan baik dengan sesama seperti panjang umur, rasa aman dan ketenangan serta terpenuhinya kebutuhan atau keinginan karena adanya kebaikan orang lain.

Ketiga, fokus pada tujuan hidup. Hal ini berhubungan dengan memahami identitas. Fokus pada tujuan hidup merupakan upaya yang harus dilakukan, agar bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Perlu waktu dan proses yang panjang untuk memahami tugas hidup ini. Tidak semua pegawai ketika pensiun mempunyai tujuan untuk bersantai saja namun ada yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya dengan mengisi waktu luangnya dengan aktivitas yang berdampak positif seperti memulai usaha baru, mengajar atau secara aktif terlibat dalam kegiatan di lingkungan sekitarnya. Ia menyadari betul bahwa hidup adalah masalah tak terkecuali pada masa pensiun yang merupakan bagian dari segmen kehidupan. Ia terus berupaya untuk membiasakan diri berpikir positif dalam menghadapi tantangan agar mampu mengendalikan hal-hal buruk yang terjadi di tengah proses mewujudkan kesuksesan.

Keempat, selalu berpikir positif. Sebagai sebuah *mindset*, berpikir positif menyiratkan makna sebagai aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri, baik potensi, semangat, tekad maupun keyakinan diri sehingga muncul perasaan, perilaku dan hal yang baik dan telah menjadi sebuah sistem. Pensiun bukanlah akhir segalanya namun awal dari segalanya. Banyak sisi positif yang dapat diambil ketika memasuki masa pensiun yaitu waktu luang yang lebih banyak sehingga bisa lebih fokus untuk beribadah, merasakan kebahagiaan bersama keluarga dan melakukan beberapa rencana yang selama bekerja belum bisa diwujudkan.

Kelima, stabilitas keuangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kestabilan finansial atau keuangan seseorang dapat mempengaruhi stabilitas mental seseorang. Stabilitas mental dapat diwujudkan dengan stabilitas keuangan, dimana sistem keuangan dalam keluarga dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi riil dengan lancar dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan yang timbul akibat guncangan. Stabilitas

keuangan pada saat pensiun, selain dari jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan pemerintah/perusahaan, pensiunan juga bisa menyiapkan kondisi keuangannya dengan cara melakukan perhitungan kebutuhan dana pensiun, kemudian menabung atau berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa pilihan investasi seperti properti, obligasi, saham atau reksadana bisa menjadi pilihan tergantung profil resiko masing-masing. Jangan pernah utang untuk kebutuhan konsumtif yang tidak perlu atau untuk mengikuti tren semata. Banyak iklan pinjaman on line yang mengajak untuk pinjam uang dengan mudah, hal ini sangat beresiko karena biaya bunga sangat tinggi. Dengan stabilitas keuangan yang mantap maka setelah pensiun tidak menjadi beban bagi anak cucu.



Terakhir, yang tidak boleh dilupakan untuk mempersiapkan pensiun adalah menjaga kesehatan agar tetap prima dengan berolah raga dan melakukan tes kesehatan secara rutin. Pahami bahwa kesehatan merupakan salah satu hal penting untuk terus dijaga karena menjadi modal utama untuk menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga memberikan jaminan kelancaran semua aktivitas hidup dan kebahagiaan. Selain itu, untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yang bermartabat agar terus diupayakan untuk selalu mengerjakan amal kebaikan, menghindari perbuatan tercela dan melakukan pertobatan. Dengan strategi tepat dan persiapan lebih dini diyakini mampu menjalani masa pensiun dengan bahagia.



PENPAS
PENERANGAN PASUKAN
TNI ANGKATAN DARAT

HINDARI JUDI ONLINE

MENYEBABKAN

1. **KECANDUAN HINGGA BUNUH DIRI**
2. **TERPURUKNYA KEUANGAN DIRI SENDIRI**
3. **MEMICU TINDAKAN KRIMINAL**
4. **PELANGGARAN PRIVASI KRIMINAL TERSEBAR LUAS DATA PRIBADI**
5. **RUSAKNYA HUBUNGAN BAIK DENGAN KELUARGA**
6. **ANAK TERANCAM PUTUS SEKOLAH**
7. **TERJEBAK LINGKARAN SETAN DENGAN PINJOL**

UU NO.19/2016 tentang perubahan atas
UU No.11/2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

**STOP
JUDI ONLINE**

